



**WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 31 TAHUN 2018**

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola kearsipan yang efektif dan efisien serta menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu diatur pembuatan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip;
- b. bahwa Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis disusun dalam rangka keamanan dan melindungi fisik arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- c. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak, perlu diatur sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
6. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 43);
7. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 10 tahun 2014 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2014 Nomor 10 Seri E.7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang .
4. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perserorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
7. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
8. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.
9. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.

10. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatas akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
11. Pengamanan arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan Klasifikasi Keamanannya.
12. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.
13. Biasa/ Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
14. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia , dan keselamatan bangsa.
15. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/ organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
16. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan / penyediaan arsip bagi kepentingan kegiatan pemanfaatan / penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
17. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otoritas legal pemanfaatan informasi publik.
18. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publiktersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.
19. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otorisasi dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam rangka melindungi fisik dan informasi arsip dari penyalahgunaan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk menyediakan informasi arsip yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses bagi kepentingan publik serta menjamin keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis meliputi:

- a. sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, dan
- b. pengaturan akses arsip.

BAB IV SESTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 5

- (1) Asas klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan pengolahan arsip dinamis.

Pasal 6

- (1) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. arsip yang tercipta pada instansi pencipta dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, rahasia, dan sangat rahasia;
 - b. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana tersebut pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
 - c. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana tersebut pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya; dan
 - d. publik dapat mengakses informasi yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- (2) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip menggunakan sarana perangkat keras dan perangkat lunak.
- (3) Perangkat keras sebagaimana tersebut pada ayat (2) meliputi :
 - a. sarana menyimpan arsip konvensional berupa lemari arsip untuk menyimpan arsip biasa/ terbuka, dan brangkas atau lemari besi untuk arsip rahasia dan sangat rahasia.
 - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi, dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (4) Perangkat lunak sebagaimana tersebut pada ayat (2) meliputi :
 - a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital;
 - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktifSistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka.

(5) Sistem klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi bidang tugas, sebagai berikut:

- a. 000 Umum
- b. 100 Pemerintahan
- c. 200 Politik
- d. 300 Keamanan dan Ketertiban
- e. 400 Kesejahteraan
- f. 500 Perekonomian
- g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan
- h. 700 Pengawasan
- i. 800 Kepegawaian
- j. 900 Keuangan

BAB V

PENGATURAN AKSES ARSIP

Pasal 7

- (1) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan kepada pengguna arsip yang berhak.
- (2) Pengguna arsip yang berhak mengakses arsip terdiri dari:
- a. pengguna internal yang ada di instansi; dan
 - b. pengguna eksternal di luar instansi.

Pasal 8

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari :
- a. penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Kepala Organisasi Perangkat Daerah/ Instansi mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya;
 - 2) pimpinan tingkat tinggi yaitu Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi yang mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin; dan
 - 3) pimpinan tingkat menengah yaitu Kepala Sub Bidang, Sub Bagian yang mempunyai kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi, pimpinan level tinggi, dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin;
 - b. pelaksana kebijakan yaitu staf, petugas arsip, arsiparis dan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan level tinggi, pimpinan level menengah, dan yang satu tingkat diatas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin;
 - c. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. publik yang berhak, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori biasa/ terbuka;
 - b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan; dan
 - c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.

Pasal 9

- (1) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun dalam daftar arsip dinamis sebagai berikut:
- a. Lampiran I kode angka 000 bidang tugas Umum;
 - b. Lampiran II kode angka 100 bidang tugas Pemerintahan;
 - c. Lampiran III kode angka 200 bidang tugas Politik;
 - d. Lampiran IV kode angka 300 bidang tugas Keamanan dan Ketertiban;
 - e. Lampiran V kode angka 400 bidang tugas Kesejahteraan;
 - f. Lampiran VI kode angka 500 bidang tugas Perekonomian;
 - g. Lampiran VII kode angka 600 bidang tugas Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan;
 - h. Lampiran VIII kode angka 700 bidang tugas Pengawasan;
 - i. Lampiran IX kode angka 800 bidang tugas Kepegawaian;
 - j. Lampiran X kode angka 900 bidang tugas Keuangan.
- Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV), kunci pengamanan ruangan dan media simpan arsip.
- (3) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kategori arsip biasa/umum/ terbuka disimpan pada rak besi;
 - b. kategori arsip terbatas disimpan pada lemari arsip; dan
 - c. kategori arsip rahasia dan sangat rahasia disimpan pada lemari besi.
- (4) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.
- (5) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Arsiparis dan /atau petugas kearsipan yang diberi kewenangan dan tanggung jawab mengelola dan mengamankan fisik serta informasi arsip.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 22 Oktober 2018

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 22 Oktober 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

MARTONI

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



SYAHRIL, SH, MH
Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
ARSIP DINAMIS

I. Umum

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
1	000	UMUM				
	001	Lambang	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		<ul style="list-style-type: none">- garuda- bendera kebangsaan- daerah- provinsi- kota /kabupaten				
	002	Penghargaan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		<ul style="list-style-type: none">- bintang- satya lencana- samkarya nugraha- monumen- penghargaan secara adat- penghargaan lainnya	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	003	<ul style="list-style-type: none">- Hari /Raya Besar Nasional 17 Agustus, Hari Pahlawan dsb,- Keagamaan- Idul Fitri- Natal dll- Hari Ulang Tahun (HUT)	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	004	Ucapan - ucapan selamat - ucapan belasungkawa - ucapan lainnya	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	005	Undangn	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	006	Tanda Jabatan - pamong praja - tanda pengenalan - pejabat lainnya	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
2	010	URUSAN DALAM				
	011	Gedung Kantor	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	012	Rumah Dinas - tanah untuk rumah dinas - prabotan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	013	Mess Guest/ House	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	014	Rumah Susun / Apartemen	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	015	Penerangan Listrik/ Jasa Listrik	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	016	Telepon/ Faksimili/ Internet	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	017	Keamanan / Ketertiban Kantor	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	018	Kebersihan Kantor	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	019	Protokol - upacara bendera - tata tempat - pemasangan gambar Presiden dan Wakil Presiden	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> - audiensi - alamat- alamat Kantor dan Pejabat - sambutan 				
3	020	PERALATAN - Penawaran / Ekspose	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	021	Alat Tulis	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	022	Mesin Kantor	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	023	Pejabat Kantor	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	024	Alat Angkutan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	025	Pakaian Dinas	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	026	Senjata	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	027	Pengadaan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	028	Inventaris	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
4	030	KEKAYAAN DAERAH				
	031	Sumber Daya Alam	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	032	Aset Daerah	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	040	PERPUSTAKAAN/ DOKUMENTASI/ KEARSIPAN/ SANDI				

	041	Perpustakaan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	042	Dokumentasi <ul style="list-style-type: none"> - foto - audio - vidio 	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	045	Kearsipan <ul style="list-style-type: none"> - pola klasifikasi - penataan berkas - penyusutan arsip - pembinaan kearsipan - pemeliharaan/ perawatan arsip 	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	046	Sandi <ul style="list-style-type: none"> - peralatan - sistem - sumber daya manusia - pembinaan persandian 	Rahasia	Eselon III	memiliki dampak keamananrahasia neagara	Bidang Teknis
5	050	PERENCANAAN <ul style="list-style-type: none"> - pelita daerah - bantuan pembangunan daerah - bappeda - perencanaan/ proyek bidang peralatan - bidang perpustakaan - bidang kearsipan - bidang sandi - organisasi/ ketatalaksanaan - penelitian 	Terbatas		Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sub.bagian, sub.bidang
	051	Bidang Pemerintahan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	052	Bidang Politik	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	053	Bidang Kemanan Ketertiban	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	054	Bidang Kesejahteraan Rakyat	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	055	Bidang Perekonomian	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	056	Bidang Pekerjaan Umum	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	057	Bidang Pengawasan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	058	Bidang Kepegawaian	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	059	Bidang Keuangan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
6	060	ORGANISASI KETATALAKSANAAN				
	061	Organisasi Pemerintah - susunan dan tata kerja - tata tertib kantor, jam kerja	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	062	Organisasi Badan Non Pemerintah	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	063	Organ Badan Internasional	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	064	Organisasi semi pemerintah	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	065	Ketatalaksanaan/ Tata Naskah/ Sistem	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	066	Stempel Dinas	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	067	Pelayanan Umum	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	068	Komputerisasi/ Siskomendagri	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

7	070	PENELITIAN				
	071	Riset	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	072	Survey	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	073	Kajian	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	074	Kerjasama Penelitian dengan perguruan tinggi	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	075	Departemen	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	076	Non Depertemen	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	077	Provinsi	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	078	Kabupaten/Kota	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	079	Kecamatan /Desa	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
8	080	KONFERENSI				
	081	Gubernur	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	082	Bupati/ Wali Kota	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	083	Komponen Eselon lainnya	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	084	Instansi lainnya	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	085	Internasional Di dalam Negeri	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	086	Internasional di luar Negeri	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
9	090	PERJALANAN DINAS				
	091	Perjalanan Presiden dan Wakil Presiden	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	092	Perjalanan Menteri ke dalam Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	093	Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	094	Perjalanan Pegawai, termasuk pemanggilan pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	095	Perjalanan Tamu Asing ke Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	096	Perjalanan Presiden dan Wakil Presiden Keluar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	097	Perjalanan Menteri ke Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	098	Perjalanan Pejabat ke Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	099	Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

FADLY AMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM

SYAHRIL,SH,MH
Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
ARSIP DINAMIS

II. PEMERINTAHAN

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	130	PEMERINTAH KOTA				
	131	WaliKota meliputi				
		- pencalonan	Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- pengangkatan	Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- pelantikan	Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- pemberhentian	Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- serah terima jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- berita acara serah terima jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- meninggal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- memori Kepala Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	131	Sambutan / Pengarahan/ Amanat	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	132	Wakil Walikota				
		- pencalonan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- pengangkatan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- pelantikan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- pemberhatian	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- serah terima jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- berita acara serah terima jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	133	- Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota meliputi				
		- pencalonan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- pengangkatan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- meninggal	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- pelantikan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- pemberhentian	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	134	Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Muspida	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Forum Ban (Badan Anggaran Nasional)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		Forum Koordinasi lainnya	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Kerjasama antar Kabupaten / Kota	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	135	Pembentukan/ Pemekaran Wilayah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Wilayah Pembantu Bupati/ Wali Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Perubahan Batas Wilayah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Permasalahan Batas Wilayah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Ibu/Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemberian dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	136	Pembagian Wilayah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	137	Penyerahan Urusan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	138	Pemerintah Wilayah Kecamatan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Sambutan/ Pengarahan/ Amanat	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Kecamatan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemekaran Kecamatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Perluasan/ Perubahan Batas Wilayah Kecamatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Perwakilan Kecamatan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	139	Laporan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Monitoring	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Evaluasi	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
2	140	PEMERINTAHAN DESA/ KELURAHAN				
	141	Pamong Desa, meliputi : Pencalonan, Pemilahan, Meninggal, Pengangkatan, Pemberhentian, dan sebagainya	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	142	Penghasilan Pamong Jasa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	143	Kekayaan Desa/ Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	144	Dewan Tingkat Desa/ Kelurahan, Dewa, Marga, Rembung Desa/ Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	145	Administrasi / Kelurahan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	146	Kewilayahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Desa/ Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemekaran Desa/ Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Perubahan atas Wilayah/ Perluasan Desa/ Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Kerjasama antar Desa/ Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	147	Lembaga –Lembaga Tingkat Desa, jangan Klasifikasikan disini, lihat 410 dengan perinciannya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	148	Perangkat Kelurahan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Kepala Kelurahan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Sekretaris Kelurahan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Staf Kelurahan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	149	Dewan Kelurahan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Rukun Tetangga	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Rukun Warga	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
3	170	DPRD/KABUPATEN/KOTA				
	171	Keanggotaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pencalonan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pengangkatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemberhentian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Recall	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pelanggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		Pergantian Antar Waktu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	172	Persidangan - reses	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	173	Kesejahteraan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Keungan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Penghargaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	174	Hak	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	175	Sekretaris DPRD Kabupaten/ Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
4	180	HUKUM				
		Konstitusi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Dasar Hukum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Undang- Undang	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	181	Perdata	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Tanah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Rumah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Utang/ Piutang	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	182	Pidana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		Peyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	183	Peradilan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Bantuan Hukum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	184	Hukum Internasional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	185	Imigrasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Visa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pasport	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Exit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Reentry	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Lintas Batas / Batas Antar Negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	186	Rumah Tahanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	187	Kejaksaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	188	Peraturan Perundang- Undangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Peraturan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Peraturan Kabupaten Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		Keputusan Bupati/ Walikota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
5	197	Kerjasama dengan lembaga Asing	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

FADLY AMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bidang Hukum dan HAM



SYAHRIL,SH,MH
Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
 NOMOR 31 TAHUN 2018
 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
 ARSIP DINAMIS

III. POLITIK

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
1	200	POLITIK				
		<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Umum - Order Baru - Reformasi 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	210	KEPARTAIAN Meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pembubaran 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
		<ul style="list-style-type: none"> - Lambang Partai - Kartu Tanda Anggota - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
		<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan Keuangan Parpol - Rapat Koordinasi Konsolidasi Partai 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	220	ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
	221	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan Perjuangan - Berkas tentang Perjuangan Perintis Kemerdekaan 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> - Berkas tentang perjuangan angkatan 45 - Berkas Tentang Perjuangan Veteran 				
	222	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan Kekaryaan - Kekaryaan Pepabri - Kekaryaan Wredatama 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	223	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan Kerohanian 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	224	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga Adat 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
3	230	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL				
	231	<ul style="list-style-type: none"> - Ikatan Dokter Indonesia 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	232	<ul style="list-style-type: none"> - Persatuan Guru Republik Indonesia 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	233	<ul style="list-style-type: none"> - Persatuan Sarjana Hukum Indonesia 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	234	<ul style="list-style-type: none"> - Persatuan Advokat Indonesia 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	235	- Lembaga Bantuan Hukum Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	236	- Korps Pegawai Republik Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	237	- Persatuan Wartawan Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	238	- Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI)	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	239	- Organisasi Profesi dan Fungsional lainnya	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
4	240	ORGANISASI PEMUDA				
	241	- Organisasi Kepemudaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	242	- Organisasi Mahasiswa	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	243	- Organisasi Pelajar	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	244	- Organisasi Kepemudaan Keagamaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
5	250	ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN, DAN ANGKUTAN				
	251	- Organisasi Buruh Nasional	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	252	- Organisasi Buruh Internasional	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	253	- Organisasi Tani	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	254	- Organisasi Nelayan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	255	- Organisasi Angkutan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
6	260	ORGANISASI WANITA				
	261	- Dharma Wanita	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	262	- Persatuan Wanita Indonesia	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	263	- Pemberdayaan Perempuan				
	264	- Kongres Wanita	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	265	- Organisasi Wanita Keagamaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
7	270	PEMILAHAN UMUM				
	271	- Pencalonan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	272	- Nomor Urut Partai/ Tanda Gambar	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	273	- Kampanye / Dana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	274	- Petugas Pemilu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	275	- Pemilih/ Daftar Pemilih	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	276	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana - Sarana TPS - Sarana Kendaraan - Sarana Suara - Kotak Suara 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	277	<ul style="list-style-type: none"> - Pemungutan Suara/ Penghitungan Suara 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	278	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan Sumpah/ Janji anggota MPR, DPR, DPD 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
8	280	PILKADA				
	281	<ul style="list-style-type: none"> - Pencalonan 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	282	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor urut Partai/ Tanda Gambar 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	283	<ul style="list-style-type: none"> - Kampanye/ Dana 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	284	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas Pemilu 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	285	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih/ Daftar Pemilih 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	286	- Sarana - Sarana TPS - Sarana Kendaraan - Surat Suara - Kotak Suara	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	287	- Pemungutan Suara/Penghitung Suara	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	288	- Pengambilan Sumpah/ Janji anggota MPR, DPR, DPD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
9	290	KOMISI PEMILIHAN UMUM/ BAWASLU				
	291	- Panwaslu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
				<p>WALIKOTA PADANG PANJANG,</p> <p>dto</p> <p>FADLY AMRAN</p>		

DAN AKSES
ARSIP
DINAMIS

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN
IV. KEAMANAN DAN KETERTIBAN

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
1	300	KEAMANAN/ KETERTIBAN				

	301	- Polisi Pamong Praja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	302	- Penertiban PKL	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	303	- PSK	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	304	- Gepeng	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	305	- PPNS	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
2	310	PERTAHANAN				
	311	- Darat	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah KOTA PADANG PANJANG	Bidang, Seksi Subag
	312	- Laut	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah KOTA PADANG PANJANG	Bidang Teknis
	313	- Udara	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah KOTA PADANG PANJANG	Bidang Teknis
	314	- Perbatasan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah KOTA PADANG	Bidang Teknis

					PANJANG	
3	320	KEMILITERAN				
	321	- Latihan Militer	Terbatas	Eselon III	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah KOTA PADANG PANJANG	Bidang Teknis
	322	- Wajib Militer	Terbuka	Eselon III	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah KOTA PADANG PANJANG	Bidang Teknis
	323	- Operasi Militer	Terbuka	Eselon III	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah KOTA PADANG PANJANG	Bidang Teknis
	324	- Kekayaan ABRI/ TNI	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah KOTA PADANG PANJANG	Bidang Teknis
	325	- Pejabat Sipil dari ABRI/ TNI Klasifikasi Dwifungsi ABRI/ TNI	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah KOTA PADANG PANJANG	Bidang Teknis
4	330	KEAMANAN				
	331	- Kepolisian	Terbatas	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah KOTA PADANG PANJANG	Bidang Teknis
	332	- Huru Hara / Demonstrasi	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah KOTA PADANG PANJANG	Bidang Teknis
	333	- Senjata Api / Senjata Tajam	Terbatas	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan	Bidang Teknis

					Pemerintah KOTA PADANG PANJANG	
	334	- Bahan Peledak	Terbatas	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah KOTA PADANG PANJANG	Bidang Teknis
	335	- Perjudian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	336	- Surat- Surat Kaleng	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	337	- Pengaduan	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	338	- Himbauan /Larangan	Terbuka	Eselon III	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang	Bidang Teknis
5	340	PERTAHANAN SIPIL				
	341	- Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
6	350	KEJAHATAN				
	351	- Makar/ Pemberontakan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah KOTA PADANG PANJANG	Bidang Teknis
	352	- Pembunuhan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan	Bidang Teknis

					Pemerintah KOTA PADANG PANJANG	
	353	- Penganiayaan, pencurian, dan perampasan	Rahasia	Eselon III	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah KOTA PADANG PANJANG	Bidang Teknis
	354	- Subversi/ Penyelundupan/ Narkotika	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah KOTA PADANG PANJANG	Bidang Teknis
	355	- Pemalsuan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah KOTA PADANG PANJANG	Bidang Teknis
	356	- Korupsi/ Penyelewengan/ Penyalahgunaan Jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	357	- Permokasaan / Pembuatan Cabul	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	358	- Kenakalan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	359	- Kejahatan lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
7	360	BENCANA				
	361	- Gunung Berapi/ Gempa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak	Bidang Teknis
	362	- banjir /Tanah Longsor	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang	Bidang Teknis

					mengganggu kinerja	
	363	- Angin Topan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	364	Kebakaran - Pembinaan - penanggulangan - pencegahan - pemadaman - pengujian instalasi - antisipasi - proteksi, APAR - kebutuhan sarpras	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	365	Kekeringan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	366	Tsunami	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
8	370	KECELAKAAN SAR	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	371	- Darat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	372	- Udara	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	373	- Laut	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	374	- Sungai/ Danau	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

FADLY AMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM

SYAHRIL, SH, MH
 Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
 NOMOR 31 TAHUN 2018
 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN
 DAN AKSES ARSIP DINAMIS

V. KESEJAHTERAAN RAKYAT

1	2	3	4	5	6	7
1	400	KESEJAHTERAAN RAKYAT				
	401	Keluarga Miskin	Biasa / Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bidang Teknis
	402	Bantuan Langsung Tunai	Biasa / Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bidang Teknis
	403	Raskin	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bidang Teknis
	404	Askeskin	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bidang Teknis
	405	Jamkessos / Jamkesda	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bidang Teknis
2	410	PEMBANGUNAN DESA/ KELURAHAN				
	411	PEMBINAAN USAHA GOTONG ROYONG				
	412	a. Swadaya Gotong Royong - penataan gotong royong - gotong royong dinamis - gotong royong statis - pungutan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		b. Lembaga Sosial Desa (LSD) - pembinaan - klasifikasi - proyek - musyawarah desah	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis

		c. Latihan Kerja Masyarakat (LKM) - kader masyarakat - kuliah kerja nyata (KKN) - pusat latihan - kursus- kursus - kurikulum/ syllabus - keterampilan - pramuka	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota (LPMK)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		e. Badan Kewasdayaan Masyarakat (BKM)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		f. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 1. program 2. pembinaan organisasi 3. kegiatan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		g. Penyuluhan 1. publikasi 2. peragaan 3. sosio drama 4. siaran pedesaan 5. penyuluhan lapangan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		h. Kelembagaan Desa 1. kelompok tani 2. rukun tani 3. subak 4. dharma tirta	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	412	PEREKONOMIAN DESA				
		a. Produksi desa 1. pengolahan 2. pemasaran	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis

		b. Keuangan Desa <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkreditan desa 2. inventarisasi desa 3. perkembangan/ pelaksanaan 4. bantuan / stimulasi 5. petunjuk/ pembinaan, pelaksanaan 	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		c. Koperasi Desa <ol style="list-style-type: none"> 1. badan usaha unit desa (BUUD) 2. Koperasi Unit Desa (KUD) 	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		d. Penataan Bantuan Pembangunan Desa <ol style="list-style-type: none"> 1. jumlah desa yang diberi bantuan 2. pengarahan 3. pusat 4. daerah 	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		e. Alokasi Bantuan Pembangunan Desa <ol style="list-style-type: none"> 1. pusat 2. daerah 	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		f. Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa <ol style="list-style-type: none"> 1. bantuan langsung 2. bantuan keserasian 3. bantuan juara lomba desa 	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		g. program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis

	413	PRASARANA DESA				
		a. Prasarana Desa 1. pembinaan 2. bimbingan teknis	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		b. Pemukiman Kembali Penduduk 1. lokasi 2. diskusi 3. pelaksanaan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		c. Masyarakat Pradesa 1. pembinaan 2. penyuluhan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		d. Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa 1. Rumah sehat 2. proyek printis 3. pelaksanaan 4. pengembangan 5. perbaikan kampung	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	414	PEMBANGUNAN DESA				
		a. Tingkat Pembangunan Desa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		1. jumlah desa 2. pemekaran desa 3. pembentukan desa baru 4. evaluasi 5. bagan				
		b. Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		1. penyuluhan program 2. lokasi UDKP				

		3. pelaksanaan 4. bimbingan/ pembinaan 5. evaluasi				
		c. Tata Desa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		1. invetarisasi 2. penyusunan pola tata desa 3. aplikasi tata desa 4. pemetaan 5. pedoman pelaksanaan 6. evaluasi				
		d. Perlombaan Desa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		1. pedoman 2. penilaian 3. kejuaraan 4. piagam				
	415	KOORDINASI	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		a. Sektor Khusus	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang koordinasi sector khusus di pemerintahan KOTA PADANG PANJANG				
		b. Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis

		Berkas tentang rapat koordinasi ahorizontal dengan lembaga di lingkungan internal dan eksternal pemerintah KOTA PADANG PANJANG				
		c. Tim Koordinasi Pusat (TKP)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang tim koordinasi pusat				
		d. Kerja Sama	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		1. Luar Negeri (UNICEF) 2. perguruan tinggi 3. dapartemen / lembaga non departemen				
3	420	PENDIDIKAN				
	421	SEKOLAH				
		a. pra sekolah	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		b. Sekolah Dasar / Sederajat	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		c. Sekolah Menengah /Sederajat	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		d. Sekolah Tinggi/ Sederajat	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		e. Sekolah Kejuruan / Sederajat	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis

		f. Kegiatan Sekolah, Dies Natalis, Lustrum	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		g. Kegiatan Pelajar 1. Reuni, Dharmawisata 2. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 3. Pelajar Teladan dan 4. Resimen Mahasiswa (MENWA)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		h. Sekolah Didikan Luar Biasa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		i. Pendidikan Luar Sekolah / Pemberantasa Buta Huruf	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	422	ADMINISTRASI SEKOLAH				
		a. Persyaratan masuk sekolah, testing, ujian, pendaftaran, mampras, perpeloncoan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		b. tahun pelajaran	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		c. hari libur	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		d. uang sekolah	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		e. bea siswa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis

		f. biaya operasional siswa (BOS)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	423	METODE BELAJAR				
		a. kuliah	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		b. ceramah, simposium	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		c. diskusi	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		d. kuliah lapangan, widyawisata, KKN, Studi Tour	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		e. kurikulum	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		f. karya tulis	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		g. ujian	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	424	TENAGA PENGAJAR Berkas tentang tenaga pengajar yang meliputi guru, dosen, dekan, rector, dan guru teladan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	425	SARANA PENDIDIKAN				
		a. gedung 1. gedung sekolah 2. kampus 3. pusat kegiatan mahasiswa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis

		b. buku berkas tentang buku pelajaran dan diklat kuliah	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		c. perlengkapan Sekolah berkas tentang perlengkapan sekolah	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	426	KEOLAHRAGAAN				
		a. cabang olah raga	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		b. sarana 1. gedung olah raga 2. stadion 3. lapangan 4. kolam renang	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		c. pesta olah raga	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		d. KONI	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	427	KEPEMUDAAN Berkas tentang kepemudaan yang meliputi organisasi pemuda, kegiatan remaja dan gelanggang remaja	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	428	KEPRAMUKAAN	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	429	PENDIDIKAN KEDINASAN DEPDAGRI	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
4	430	KEBUDAYAAN	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis

	431	KESENIAN				
		a. cabang kesenian	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		b. sarana berkas tentang gedung kesenian	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	432	KEPERBUKALAAN				
		a. museum	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		b. peninggalan kuno 1. candi, termasuk pemugaran 2. benda peninggalan kuno	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	433	SEJARAH	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	434	BAHASA	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	435	USAHA PERTUNJUKAN, HIBURAN, KESENANGAN Berkas tentang usaha pertunjukan, hiburan, dan kesenangan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	436	KEPERCAYAAN Berkas tentang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
5	440	KESEHATAN				

	441	PEMBINAAN KESEHATAN	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		a. gizi b. mata c. jiwa d. kanker e. usaha kesehatan sekolah (UKS) f. perawatan g. penyuluhan kesehatan h. masyarakat (PKM) i. Pekan Imunisasi Nasional				
	442	OBAT- OBATAN				
		a. pengadaan b. penyimpanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	443	PENYAKIT MENULAR				
		a. pencegahan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		b. pemberantasan dan pencegahan penyakit menular langsung (P2ML)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		c. Epidemilogi dan Karantina (Epidka) 1. kholera 2. imunisasi 3. survailense 4. rabies/ anjing gila, antraks	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis

		d. pembarantasan dan pencegahan penyakit menular sumber binatang (P2B)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		1. malaria 2. dengue faemorrhagic fever (demam berdarah HDF) 3. filaria 4. serangga				
		e. Hygiene Sanitasi 1. tempat- tempat pembuatan dan 2. penjualan makanan dan minuman (TPPMM) 3. Sarana air minum dan jamban keluarga (samijaga) 4. pestisida	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	444	GIZI				
		a. kekurangan makanan, bahaya kelaparan, busung lapar b. keracunan makanan c. menu makanan rakyat d. badan perbaikan gizi dan daerah (BPGD) e. program makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis

	445	RUMAH SAKIT, BALAI KESEHATAN, PUSKESMAS, POLIKLINIK, POSYANDU	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	446	TENAGA MEDIS	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	447	ALAT MEDIS	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	448	PENGobatan TRADISIONAL				
		a. pijat b. tusuk jarum c. jamu tradisiona/ herbal d. dukun/ paranormal	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
6	450	AGAMA				
	451	ISLAM				
		a. peribadatan 1. sholat 2. zakat, fitra 3. puasa 4. MTQ	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		b. Rumah ibadah	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		c. tokoh agama	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		d. pendidikan 1. tinggi 2. menengah 3. dasar	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis

		4. pondok pesantren 5. gedung sekolah 6. tenaga pengajar 7. buku 8. dakwah 9. organisasi/ lembaga pendidikan 10. TPA/TQA/ TPQ				
		e. Harta Agama	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		f. peradilan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		g. organisasi keagamaan bukan politik	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		h. mazhab	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	452	KRISTEN PROTESTAN				
		a. peribadat b. rumah ibadah c. tokoh agama/ rohaniawan d. pendeta /domine e. mazhab f. organisasi gerejani	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	453	KATHOLIK				
		a. peribadatan b. rumah ibadah c. tokoh agama/ rohaniawan d. pastor	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis

		e. mazhab f. organisasi grejani				
	454	HINDU				
		a. peribadatan b. ruamah ibadah c. tokoh agama/ rohaniawan d. mazhab e. organisasi keagamaan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	455	BUDHA				
		a. peribadatan b. ruamah ibadah c. tokoh agama/ rohaniawan d. mazhab e. organisasi keagamaan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	456	URUSAN HAJI				
		a. ONH b. umroh c. manasik	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
7	460	SOSIAL				
	461	REHABILITASI PENDERITA CACAT				
		a. cacat mata b. cacat tubuh c. cacat mental d. bisu tuli	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	462	TUNA SOSIAL				
		a. gelandangan b. ibu teladan c. keluarga sakinah d. anak asuh	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis

	463	KESEJAHTERAAN ANAK/ KELUARGA				
		a. anak putus sekolah b. ibu teladan c. keluarga sakinah d. anak asuh	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	464	PEMBINAAN PAHLAWAN				
		a. pahlawan b. perintis kemerdekaan c. cacat veteran	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	465	KESEJAHTERAAN SOSIAL				
		a. lanjut usia b. korban kekacauan, pengungsi, repatrasi	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	466	SUMBANGAN SOSIAL				
		a. korban bencana b. pencarian dana untuk sumbangan c. panti asuhan d. panti jompo	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	467	BIMBINGAN SOSIAL Berkas tentang bimbingan, pendidikan, kesehatan, pemukiman untuk masyarakat suku terasing	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	468	PMI	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis

	469	MAKAM				
		<ul style="list-style-type: none"> a. umum b. pahlawan c. khusus keluarga raja d. krematorium 	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
8	470	KEPENDUDUKAN				
	471	PENDAFTARAN PENDUDUK				
		<ul style="list-style-type: none"> a. Indentitas Penduduk <ul style="list-style-type: none"> 1. biodata 2. nomor induk kependudukan 3. kartu tanda penduduk 4. kartu keluarga 5. advokasi indentitas penduduk 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		<ul style="list-style-type: none"> b. perpindahan penduduk dalam wilayah indonesia <ul style="list-style-type: none"> 1. perpindahan penduduk WNI 2. perpindahan penduduk warga WNA dalam wilayah Indonesia 3. perpindahan penduduk WNA dan WNI tinggal sementara 4. daerah terbelakang 5. bedol desa 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		<ul style="list-style-type: none"> c. perpindahan penduduk antar Negara <ul style="list-style-type: none"> 1. penduduk Indonesia ke luar Negeri 2. orang asing tinggal sementara 	Terbatas	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis

		3. orang asing tinggal tetap 4. perpindahan penduduk antar negara (pelintas antar tradisional)				
		d. pendaftaran pengungsi dan penduduk rentan 1. akibat bencana alam 2. akibat kerusakan sosial 3. pendaftaran penduduk daerah terbelakang 4. pendaftaran penduduk rentan	Terbatas	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	472	PENCATATAN SIPIL				
		a. kelahiran , kematian, dan advokasi 1. kelahiran 2. kematian 3. advokasi kematian dan kelahiran 4. perkawinan, perceraian, dan advokasi	Terbatas	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		b. perkawinan agama islam 1. perkawinan agama non islam 2. perceraian agama islam 3. perceraian agama non islam 4. advokasi perkawinan dan perceraian	Terbatas	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		c. pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta dan advokasi	Terbatas	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis

		1. pengangkatan anak 2. pengakuan anak 3. pengesahan anak 4. perubahan akta 5. pembatalan akta 6. advokasi pengurusan 7. pengangkatan, pengakuan, DNA pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta				
		d. pencatatan kewarganegaraan 1. akibat perkawinan 2. akibat kelahiran 3. non perkawinan 4. non kelahiran 5. perubahan WNI dan ke WNA 6. perubahan WNA ke WNI	Terbatas	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	473	INFORMASI KEPENDUDUKAN				
		a. teknologi informasi 1. perangkat keras 2. perangkat lunak 3. jaringan komunikasi data	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
		b. kelembagaan dan sumber daya informasi 1. daerah maju 2. daerah berkembang 3. daerah terbelakang	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
		c. pengolahan data kependudukan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis

		1. pendaftaran penduduk 2. kejadian vital penduduk 3. penduduk non registrasi				
		d. pelayanan informasi kependudukan 1. media elektronik 2. media cetak 3. outlet	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	474	PERKEMBANGAN PENDUDUK				
		a. pengarah kuantitas penduduk 1. struktur jumlah 2. komposisi 3. fertilitas 4. kesehatan reproduksi 5. morbiditas penduduk 6. mortalitas penduduk	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
		b. pengembangan kuantitas penduduk 1. anak dan remaja 2. penduduk usia produktif 3. penduduk lanjut usia 4. gender	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
		c. penataan persebaran penduduk 1. migrasi antar wilayah 2. migrasi internasional 3. urbanisasi 4. sementara 5. migrasi non permanen	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
		d. perlindungan dan pemberdayaan penduduk 1. pengembangan sistem	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis

		perlindungan penduduk 2. pelayanan kelemagaan ekonomi 3. pelayanan kelembagaan sosial budaya 4. partisipasi masyarakat				
		e. pengembangan wawasan kependudukan 1. pendidikan jalur sekolah 2. pendidikan jalur luar sekolah 3. pendidikan jalur masyarakat 4. pembangunan berwawasan kependudukan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	475	PROYEKSI DAN PENYERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN				
		a. indikator kependudukan 1. perumusan penetapan dan pengembangan indikator kependudukan 2. pemanfaatan indikator kependudukan 3. sosialisasi indikator kependudukan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
		b. proyeksi penduduk 1. penyusunan dan pengembangan proyeksi kependudukan 2. pemanfaatan proyeksi	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis

		kependudukan				
		c. analisis dampak kependudukan 1. penyusunan dan pengembangan analisis dampak kependudukan 2. pemanfaatan analisis dampak kependudukan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
		d. penyerasian kebijakan lembaga non pemerintah 1. lembaga internasional 2. lembaga masyarakat dan nirlaba 3. lembaga usaha swasta	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
		e. penyerasian kebijakan lembaga pemerintah 1. lembaga pemerintah 2. pemerintah provinsi dan kota 3. pemerintah kabupaten	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
		f. analisis berkas tentang analisis proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	476	MONITORING	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	477	EVALUASI	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	478	DOKUMENTASI KEPENDUDUKAN	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis

	479	KELUARGA BERENCANA	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
9	480	MEDIA MASSA				
	481	PENERBITAN 1. surat kabar 2. majalah 3. buku 4. penerjemahan 5. buletin 6. jurnal 7. kliping	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	482	RADIO 1. RRI 2. Non RRI 3. Radio luar negeri 4. Radio internet	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	483	TELEVISI 1. TVRI 2. swasta lokal, nasional 3. luar negeri 4. televisi internet	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	484	FILM	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	485	PERS 1. kewartawanan 2. wawancara 3. informasi nasional	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	486	GRAFIKA	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis

	487	PENERANGAN Berkas tentang pameran non komersil	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	488	OPERATION ROOM Berkas tentang operation room terkait media massa	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	489	HUBUNGAN MASYARAKAT Berkas tentang hubungan masyarakat terkait media massa	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM

SYAHRIL,SH,MH
Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto
FADLY AMRAN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
 NOMOR 31 TAHUN 2018
 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
 ARSIP DINAMIS

VI. PEREKONOMIAN

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
1	500	- PEREKONOMIAN • Dewan Stabilasi	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	501	- PENGADAAN PANGAN	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	502	- PENGADAAN SANDANG	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	503	- Perizinan pada umumnya untuk perizinan suatu bidang, klasifikasi pada masalahnya(IMB, SIUP, TDP,HO, TDG)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
2	510	- PERDAGANGAN/ TATANIAGA				
		Promosi perdagangan - pekan raya - iklan - pameran / ekspo komersil - pelelangan - tera/ timbang - ulang/ kalibrasi	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	511	Pemasaran - sembilan bahan pokok - pasar tradisional - pasar modern - pertokoan, kaki lima, kios	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis

	512	EKSPOR	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	513	IMPOR	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	514	PERDAGANGAN ANTAR PULAU	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	515	PERDAGANGAN LUAR NEGERI	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	516	PERGUDANGAN, TERMASUK TANGKI PENYIMPANAN MINYAK ORANG	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	517	ANEKA USAHA PERDAGANGAN	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	518	KOPERASI (BUUD,KUD,KUR)	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
3	520	PERTANIAN				
	521	Tanaman pangan program <ul style="list-style-type: none"> - bimas /inmas termasuk kredi - penyuluhan Produksi <ul style="list-style-type: none"> - padi/ panen - palawija - jagung - ketela pohon, ubi- ubian - hortikultura - sayuran/ buah- buahan - tanaman hias - pembudidayaan rumput laut 	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis

		<p>Saran usaha pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - peralatan - pembibitan - pupuk <p>Perlindungan Tanaman</p> <ul style="list-style-type: none"> - penyakit, penyakit daun, penyakit batang, - hama- hama serangga, wereng, walang sangit, tungro, hama tikus dan sejenisnya - pemberantasan hama, meliputi ; penyemprotan, penyiangan, geropyokan, sprayer, pemberantasan melalui udara - pestisida <p>Tanah pertanian pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - persawahan - perladangan - kebun - rumpon ikan laut - KTA/ Lahan kritis - pengusaha petani - bina usaha - pasca panen - pemasaran hasil - kelompok tani - rukun tani 				
	522	<p>Kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - program - hak pengusahaan hutan - tata guna hutan - perpetaan hutan - tumpangsari 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> - produksi - kayu - non kayu - sarana usaha kehutanan - penghijauan /reboisasi - kelestarian <ul style="list-style-type: none"> - cagar alam , margasatwa, suaka marga satwa - berburu, meliputi larangan dan izin berburu - kebun binatang - konservasi lahan - penyakit hama - jenis – jenis hutan <ul style="list-style-type: none"> - hutan hidup - hutan wisata - hutan produksi - hutan lindung 				
	523	Perikanan <ul style="list-style-type: none"> - program - penyuluhan - teknologi - produksi - pelelangan - usaha perikanan - pembibitan - daerah penangkapan - pertambakan, meliputi; tambak ikan deras , tambak udang dan lain-lain - sarana - peralatan - kapal - pelabuhan 	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis

	524	Peternakan				
		<ul style="list-style-type: none"> - produksi - susu ternak rakyat - telur - daging - kulit - sarana usaha ternak - pembibitan - kandang ternak - kesehatan hewan - penyakit hewan - pos kesehatan hewan - tes pullorum - karantina - pemberantasan penyakit hewan termasuk upaya pencegahannya - perunggasan - pengembangan ternak - inseminasi bantuan - pembibitan/ bibit unggul - penyebaran ternak <ul style="list-style-type: none"> - makanan ternak - tempat pemotongan hewan - data peternakan 	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	525	Perkebunan				
		<ul style="list-style-type: none"> - program - produksi - karet - teh - tembakau - tebu - cengkeh - kopra 	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> - kopi - coklat - aneka tanaman 				
4	530	Perindustrian - undang -undang gangguan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	531	Industri logam	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	532	Industri mesin/ elektronik	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	533	Industri kimia/ farmasi	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	534	Industri tekstil	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	535	Industri makanan/ minuman	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	536	Aneka industri/ perusahaan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	537	Aneka kerajinan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	538	Usaha negara / BUMN <ul style="list-style-type: none"> - perusahaan jawatan - perusahaan umum - persero, / PT, CV, UDFirma 	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis

	539	Perusahaan daerah/ BUMD	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
5	540	Pertambangan/ Kesamuderaan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	541	BBM	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	542	Gas bumi <ul style="list-style-type: none"> - eksploitasi/ Pengeboran - kontrak kerja - pengolahan tengki, pompa tanker 	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	543	Logam Mulia <ul style="list-style-type: none"> - emas - intan/ batu mulia - perak 	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	544	Logam <ul style="list-style-type: none"> - timah - alumanium, boxit - besi, termasuk besi tua - tembaga 	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	545	Aneka tambang <ul style="list-style-type: none"> - batu bara 	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	546	Geologi <ul style="list-style-type: none"> - vulkanologi - pengawasan gunung berapi - sumur artesis, air bawah tanah 	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	547	Hidrologi	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis

	548	kesamuderaan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
		PERHUBUNGAN				
6	550	- Perhubungan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	551	Perhubungan Darat <ul style="list-style-type: none"> - lalulintas jalan raya, sungai, danau - keamanan lalulintas, rambu-rambu - angkutan jalan raya - perizinan - alat angkutan - terminal - perkeretaapian 	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	554	Pos	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	555	Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> - Telepon/ HT - telegram - telex, SSB, Faximile - Satelit, Internet - Stasiun Bumi, Parabola - Menara Telekomunikasi 	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	556	Pariwisata dan Rekreasi <ul style="list-style-type: none"> - obyek kepariwisataan - perhotelan - travel servise - tempat reaksreasi - tempat sejarah/ monumen 	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	557	Meteorologi <ul style="list-style-type: none"> - ramalan cuaca 	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis

		- curah hujan - kemarau panjang			Kerja	
		TENAGA KERJA				
7	560	Tenaga Kerja - pengangguran	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	561	Upah	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	562	Penempatan tenaga kerja, TKI Outsourcing	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	563	Latihan kerja, magang	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	564	Tenaga Sukarela - butsi - padat karya	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	565	Perselisihan perburuhan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	566	Keselamatan kerja	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	567	Pemutusan Hubungan kerja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	568	Kesejahteraan buruh (kesehatan, perumahan, dll)	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	569	Tenaga orang asing	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis

		PERBANKAN/ MONETER				
8	570	Permodalan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	571	Modal domestik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	572	Modal asing	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	573	Modal Patungan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	574	Pasar Uang dan Modal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	575	Saham	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
9	580	Perbankan / Moneter	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	581	Kredit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	582	Investasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	583	Deposito	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	584	Bank Pembangunan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis

	585	Asuransi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	586	Alat pembayaran, cek, giro, wesel, transfer	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	587	Fiskal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	588	Hutang Negara/ obligasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	589	Moneter	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
10	590	Agraria	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	591	Tata Guna Tanah <ul style="list-style-type: none"> - pemetaan dan pengukuran - perpetaan - penyediaan data - fatwa tata guna tanah - tanah kritis 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	592	Landreform <ul style="list-style-type: none"> - redistribusi - pendaftaran pemilikan dan pengurusan - penentuan tanah obyek landreform - pembagian tanah obyek landreform - sangketa retribusi - tanah obyek landreform - ganti rugi - ganti rugi tanah kelebihan, 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis

		<p>meliputi sengketa ganti rugi tanah kelebihan</p> <ul style="list-style-type: none"> - ganti rugi tanah absentee, meliputi sengketa ganti rugi absentee - ganti rugi tanah partikelir, meliputi sengketa ganti rugi tanah partikelir - bagi hasil - penetapan imbangan bagi hasil - pelaksanaan perjanjian bagi hasil - sengketa perjanjian bagi hasil - gadai tanah - pendaftaran pelaksanaan gadai tanah - pelaksanaan gadai tanah - sengketa gadai tanah - bimbingan dan penyuluhan - pengembangan - yayasan dana landreform (YDL) 				
	593	<p>Pengurusan hak- hak tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> - penyusunan program dan bimbingan teknis - sewa tanah - sewa tanah untuk tanaman tertentu, tebu, tembakau, rosella, corchorus - hak milik - perorangan - badan hukum - hak pakai - perseorangan, warga negara Indonesia (WNI) - perseorangan , Warga Negara 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis

		<p>Asing (WNA)</p> <ul style="list-style-type: none">- badan hukum- badan hukum Indonesia- badan hukum asing, kedutaan, konsulat kantor dagang asing- tanah gedung- gedung negeri- guna usaha- perkebunan besar- perkebunan rakyat- peternakan- perikanan- kehutanan- hak guna bungunan- perorangan- badan hukum- P3MB(panitia penguasaan Milik Belanda)- badan hukum asing belanda – PRK No. 5165- pemulihan hak PerPres 4/ 1960- hak pengelolaan- PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial, Estase, Real Estase- perusahaan daerah- pembangunan perumahan- sengketa tanah- peradilan perkara tanah (lihat klasifikasi 183)- pencabutan dan pembebasan tanah- pencabutan hak- pembebasan tanah- ganti rugi tanah				
--	--	--	--	--	--	--

		Pendaftaran Tanah				
	594	<ul style="list-style-type: none"> - Pengukuran/ pemetaan - fotogrametri - teristik - triangulasi - peralatan - dana pengukuran (Permen Agraria No.61/ 1965) - sertifikat - pejabat pembuat akta tanah (PPAT) - ajudikasi 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	595	Lahan Tramigrasi <ul style="list-style-type: none"> - tata guna tanah - landreform - pengurusan hak – hak tanah - pendaftaran tanah 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	596	Tanah Kosong	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

FADLY AMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan HAM

SYAHRIL, SH, MH
 Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
 NOMOR 31 TAHUN 2018
 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
 ARSIP DINAMIS

VII. PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
1	600	Tata bangunan konstruksi, dan industri konstruksi	Biasa/ terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit kerja	Bidang Teknis
	602	Kontraktor Pemborong <ul style="list-style-type: none"> - tender/ lelang - penunjukan langsung - prakualifikasi <ul style="list-style-type: none"> - daftar rekanan mampu (DRM) - tanda daftar rekanan (TDR) 	Biasa/ terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit kerja	Bidang Teknis
	603	Arsitektur	Biasa/ terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit kerja	Bidang Teknis
	604	Bahan bangunan <ul style="list-style-type: none"> - tanah dan batu - aspal, aspal buatan, aspal alam - besi dan logam lainnya <ul style="list-style-type: none"> - besi beton - besi profil - paku - alumunium, profil - bahan bahan perlindungan dan pengawet - semen 	Biasa/ terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit kerja	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> - kayu seperti balok, papan , dolken - bahan penutup atap - alat- alat penggantung dan pengunci - bahan –bahan bangunan lainnya 				
	605	Instalasi <ul style="list-style-type: none"> - instalasi bangunan - instalasi listrik - instalasi air sanitasi - instalasi pengatur udara - instalasi akustik - instalasi cahaya, penerangan 	Biasa/ terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit kerja	Bidang Teknis
	606	Konstruksi pencegahan <ul style="list-style-type: none"> - konstruksi pencegahan terhadap kebakaran - konstruksi pencegahan terhadap gempa - konstruksi pencegahan terhadap angin udara - konstruksi pencegahan terhadap kegaduhan - konstruksi pencegahan terhadap gas/ eksplosive - konstruksi pencegahan terhadap serangga - konstruksi pencegahan terhadap radiasi atom 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit kerja	Bidang Teknis
2	610	Irigasi <ul style="list-style-type: none"> - bangunan waduk - bendungan - tanggul - pelimpahan banjir - menara pengambilan - bangunan pengambilan 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit kerja	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> - bendungan - bendungan dengan pintu bilas - bendungan dengan pompa - pengambilan bebas - pengambilan bebas dengan pompa - sumur dengan pompa - kantong lumpur - silt esktraktor - escape channel - Bangunan pembawa <ul style="list-style-type: none"> - saluran - bangunan - box tersier - got miring - talang - syphon - gorong- gorong - pelimpah samping - Bangunan Pembuang <ul style="list-style-type: none"> - saluran - bangunan - gorong- gorong pembuang - talang pembuang - syphon pembuang - Bangunan Lainnya <ul style="list-style-type: none"> - jalan - jembatan - tangga cuci - kubangan kerbau - waduk lapangan - bangunan penunjang - jaringan telepon - stasiun agro 				
	611	Folder <ul style="list-style-type: none"> - tanggul keliling 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> - tanggul - bangunan penutup sungai - jembatan - bangunan pembawa - saluran - stasiun pompa pemasukan - bangunan bagi - gorong- gorong - syphon - Bangunan Pembawa - saluran - stasiun pompa pemasukan - bangunan bagi - gorong – gorong - syhphon - bangunan pembuang - stasiun pompa pembuang - saluran - pintu air pembuangan - gorong- gorong pembuangan - syphon pembuangan - bangunan lainya - bangunan - rumah petugas eksploitasi 			Kerja	
	612	Pasang surut <ul style="list-style-type: none"> - bangunan pembawa - saluran - bangunan pintu pemasukan - bangunan pembuang - saluran - bangunan pintu pembuang - bangunan lainnya 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit kerja	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> - kolam pasang - saluran - bungunan - jalan - jembatan 				
	613	Pengendalian Sungai <ul style="list-style-type: none"> - bangunan pengaman - tanggul banjir - pintu pengatur banjir - klep pengatur banjir - tembok pengaman talud - krib - kantung lumpur - chek – dam - syphon - saluran pengaman - saluran banjir - saluran drainage - corepure - bangunan lainnya - warning system - stasiun 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit kerja	Bidang Teknis
	614	Pengamanan pantai <ul style="list-style-type: none"> - tanggul - krib - bangunan lainnya 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit kerja	Bidang Teknis
	615	Air tanah <ul style="list-style-type: none"> - stasium pompa - bangunan pembawa - bangunan pembuang - bangunan lainnya 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit kerja	Bidang Teknis
3	620	Jalan kota <ul style="list-style-type: none"> - daerah penguasaan - tanah - tanaman 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit kerja	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none">- bangunan- bangunan sementara- jalan sementara- jembatan sementara- kantor proyek- gudang proyek- barak kerja- laboratorium lapangan- rumah- badan jalan- pekerjaan tanah- stabilitasi- perkerasan- lapis pondasi bawah- lapis pondasi- lapis permukaan- drainage- parit tanah- gorong- gorong- buku trotuir- tanah- perkerasan- pasangan- median- tanah- tanaman- perkerasan- pasangan- daerah samping- tanaman- pagar- bangunan perlengkapan dan pengamananan- rambu- rambu tanda lalu lintas- lampu penerangan- lampu pengatur lalu lintas				
--	--	--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - patok- patok KM - patok- patok ROW (Sempadan) - rel pengamananan - pagar - turap ,penahan - bronjong 				
	621	<p>Jalan Luar Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - daerah penguasaan - tanah - tanaman - bangunan - bangunan sementara - jalan sementara - jembatan sementara - kantor proyek - gedung proyek - berak kerja - laboratorium lapangan - rumah - badan jalan - pekerjaan tanah - stabilisasi - perkerasan - lapis pondasi - lapis pondasi bawah - lapis permukaan - drainage - parit - gorong- gorong - sub drainage - trotoar - tanah - perkerasan - median - tanah - tanaman 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis

		<ul style="list-style-type: none"> - perkerasan - pasangan - daerah samping - tanaman - pagar - bangunan perlengkapan dan pengamanan - rambu- rambu tanda lalu lintas - lampu penerangan - lampu pengatur lalu lintas - patok- patok KM - patok- patok ROW (Sempadan) - rel pengamanan - pagar - turap, penahan - bronjong 				
	623	Jalan Layang	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
4	630	Jembatan pada jalan kota <ul style="list-style-type: none"> - daerah penguasaan - tanah - tanaman - bangunan - bangunan sementara - jalan sementara - jembatan sementara - kantor proyek - gudang proyek - barak kerja - laboratorium lapangan - rumah - pekerjaan tanah 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis

		<ul style="list-style-type: none">- galian tanah- timbunan tanah- pondasi<ul style="list-style-type: none">- pondasi kepala jalan- pondasi pilar- angker- bangunan bawah<ul style="list-style-type: none">- kepala jembatan- pilar- piloon- landasan- bangunan<ul style="list-style-type: none">- gelagar- lantai- perkerasan- jalan orang/ trotoar- sandaran- talang air- bangunan/ pengamanan<ul style="list-style-type: none">- turap/ penahan- bronjong- strek dam- kist dam- corepure- krib- bangunan perlengkapan<ul style="list-style-type: none">- rambu- rambu tanda lalu lintas- lampu penerangan- lampu pengatur lalu lintas- patok- patok KM- patok- patok ROW (Sempadan)- rel pengamanan- pagar- oprit<ul style="list-style-type: none">- badan				
--	--	--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - perkerasan - drainage - buku - median 				
	632	<p>Jembatan pada jalan luar kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - daerah penguasaan - tanah - tanaman - bangunan - bangunan sementara - jalan sementara - jembatan sementara - kantor proyek - gudang proyek - barak kerja - laboratorium lapangan - rumah - pekerjaan tanah - galian tanah - timbunan tanah - pondasi - pondasi kepala jalan - pondasi pilar - angker - bangunan bawah - kepala jembatan - pilar - piloon - landasan - bangunan atas - gelagar - lantai - perkerasan - jalan orang/ trotoar - sandaran - talang air - bangunan pengamanan 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis

		<ul style="list-style-type: none"> - turap/ penahan - bronjong - strek dam - kist dam - corepure - krib - bangunan perlengkap <ul style="list-style-type: none"> - rambu- rambu /tanda lalu lintas - lampu penerangan - lampu lalu lintas - patok- patok KM - rel- rel pengamananan - pagar - oprit <ul style="list-style-type: none"> - badan - perkerasan - drainage - baku - median 				
5	640	Bangunan pemerintah <ul style="list-style-type: none"> - gedung pengadilan - rumah pejabat negara - gedung DPR - gedung balaikota - penjara - perkantoran - rumah dinas 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	642	Bangunan Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> - taman kanak- kanak - SD/ dan Sekolah menengah - perguruan tinggi - tempat kursus/ lembaga pendidikan - tempat diklat 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis

	643	Bangunan rekreasi <ul style="list-style-type: none"> - bangunan olah raga - gedung kesenian - gedung pemancar 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	644	Bangunan perdagangan <ul style="list-style-type: none"> - supermarket, dept. stor - gedung perdagangan - bank - perkantoran 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	645	Bangunan pelayanan umum <ul style="list-style-type: none"> - mandi, cuci, kakus (MCK) umum - gedung parkir - rumah sakit/ puskesmas - gedung telkom - terminal angkutan udara - terminal angkutan air - terminal angkutan darat - bangunan keagamaan - halte/ shelter 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	646	Bangunan peninggalan sejarah <ul style="list-style-type: none"> - monumen - candi - keraton - rumah tradisional - heritage 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	647	Bangunan industri	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	648	Bangunan tempat tinggal <ul style="list-style-type: none"> - rumah perkantoran - inti/ sederhana - sedang/ mewah - rumah susun - rumah pedesaan 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis

		<ul style="list-style-type: none"> - rumah percontohan - real estate 				
	649	Elemen bangunan <ul style="list-style-type: none"> - pondasi - di atas tiang - dinding - penahan beban - tidak menahan beban - atap - lantai/ langit- langit - suspended - solit - pintu/ jendela - pintu hermonik - pintu biasa - pintu sorong - pintu kayu - jendela sorong - jendela vertikal 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
6	650	Tata kota Daerah perdagangan / pelabuhan <ul style="list-style-type: none"> - daerah pusat perbelajaan - daerah perkantoran 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	651	Daerah Pemerintahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	653	Daerah Perumahan <ul style="list-style-type: none"> - kepadatan rendah - kepadatan tinggi 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	654	Daerah Industri <ul style="list-style-type: none"> - industri berat - industri ringan - industri rumah 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	655	Daerah Rekreasi <ul style="list-style-type: none"> - taman kota - tempat olahraga dan bermain 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis

		- ruang terbuka				
	656	Transportasi <ul style="list-style-type: none"> - jaringan jalan - penerangan jalan - jaringan kereta api - jaringan sungai 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	657	Assainering <ul style="list-style-type: none"> - saluran pengumpulan - instalasi pengolahan - bangunan - unit desinfektan - unit perpompaan 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	658	Kesehatan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> - Persampahan - bangunan pengumpul - bangunan pemusnahan - pengotoran udara - pengotoran air <ul style="list-style-type: none"> - air bangunan industri - kegaduhan/ polusi suara - kebersihan kota 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
7	660	Tata lingkungan daerah hutan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	662	Daerah pertanian	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	663	Daerah permukiman	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	664	Pusat pertumbuhan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	665	Transportasi <ul style="list-style-type: none"> - jaringan jalan - jaringan kereta api 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis

		- jaringan sungai				
8	870	Ketenagaan listrik <ul style="list-style-type: none"> - kelistrikan <ul style="list-style-type: none"> - kelistrikan PLN - kelistrikan non PLN - pembangkit tenaga listrik <ul style="list-style-type: none"> - PLTA (pembangkit listrik tenaga air) - PLTD (pembangkit listrik tenaga diesel) - PLTG (pembangkit listrik tenaga gas) - PLTM (pembangkit listrik tenaga matahari) - PLTN (pembangkit listrik tenaga nuklir) - PLTPB (pembangkit listrik tenaga panas bumi) - PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) - transmisi tenaga listrik <ul style="list-style-type: none"> - gardu induk / gardu penghubung/ gardu transmisi - saluran udara tegangan tinggi - kabel bawah tanah - distribusi tenaga listrik <ul style="list-style-type: none"> - gardu distribusi - tegangan rendah - tegangan menengah - jaringan bawah tanah - perusahaan listrik <ul style="list-style-type: none"> - sambungan listrik - penjualan tenaga listrik - tarif listrik 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis

	672	Tenaga air	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	673	Tenaga minyak	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	674	Tenaga matahari	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	675	Tenaga uap	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	676	Tenaga lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
9	680	Peralatan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
10	690	Air minum intake <ul style="list-style-type: none"> - broncaptering - sumur - bendungan - saringan - pintu air - saluran pembawa - alat ukur - perpompaan 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	692	Transmisi air baku <ul style="list-style-type: none"> - perpipaan - katup udara - katub penguras - bak pelepas tekanan - jembatan pipa - syphon 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	693	Instalasi pengelolaan <ul style="list-style-type: none"> - bangunan ukur 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	Bidang teknis

		<ul style="list-style-type: none"> - bangunan aerasi - bangunan pengendapan - bangunan pembumbuh bahan kimia - bangunan pengaduk - bangunan saringan - perpompaan - clear hell 			fungsi dan tugas	
	694	Distribusi <ul style="list-style-type: none"> - reservoir menara bawah tanah - menara - reservoir dibawah tanah - perpipaan - perpompaan - jembatan pipa - syphon - hydran <ul style="list-style-type: none"> - hydran umum - hydran kebakaran - katub <ul style="list-style-type: none"> - katub udara - katub pelepasan - bak pelepasan tekanan 	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

FADLY AMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM

SYAHRIL, SH, MH
Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
ARSIP DINAMIS

VIII. PENGAWASAN

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	PWS	PENGAWASAN				
	700	- Monitoring, Pemeriksaan, Audit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	701	- Bidang urusan dalam	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	702	- Bidang peralatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	703	- Bidang kekayaan daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	704	- Bidang perpustakaan/ Dokumentasi/ Kearsipan / Sandi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	705	- Bidang perencanaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis

	707	- Bidang Penelitian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	708	- Bidang konferensi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	709	- Bidang perjalanan dinas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
2	710	BIDANG PEMERINTAHAN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	711	- Bidang pemerintahan pusat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	712	- Bidang pemerintahan provinsi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	713	- Bidang pemerintahan Kabupaten/ Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	714	- Bidang pemerintahan desa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	715	- Bidang MPR/DPR	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis

	716	- Bidang DPRD Provinsi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	717	- Bidang DPRD Kabupaten/ Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	718	- Bidang Hukum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	719	- Bidang hubungan luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
3	720	Bidang Politik				
	721	- Bidang Kepartaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	722	- Bidang organisasi kemasyarakatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	723	- Bidang organisasi profesi dan fungsional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	724	- Bidang organisasi pemuda	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	725	- Bidang organisasi buruh, tani, dan nelayan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit	Bidang teknis

					kerja	
	726	- Bidang organisasi wanita	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	727	- Bidang pemilihan umum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
4	730	BIDANG KEAMANAN / KETERTIBAN	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	731	- Bidang pertahanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	732	- Bidang Kemiliteran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	733	- Bidang perlindungan Masyarakat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	734	- Bidang Keamanan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	735	- Bidang kejahatan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	736	- Bidang bencana	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat	Bidang teknis

					daerah unit kerja	
	737	- Bidang kecelakaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
5	740	Bidang kesejahteraan rakyat	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	741	- Bidang pembangunan desa	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	742	- Bidang pendidikan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	743	- Bidang kebudayaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	744	- Bidang kesehatan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	745	- Bidang Agama	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	746	- Bidang Sosial	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	747	- Bidang kependudukan	Terbuka	Eselon III	memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit	Bidang teknis

					kerja	
	748	- Bidang Media Massa	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
6	750	- Bidang Perekonomian	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	751	- Bidang perdagangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	752	- Bidang Pertanian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	753	- Bidang Perindustrian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	754	- Bidang Pertambangan/ Kesamuderaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	755	- Bidang Perhubungan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	756	- Bidang Tenaga kerja	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	757	- Bidang Permodalan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat	Bidang teknis

					daerah unit kerja	
	758	- Bidang tentang perbankan/ Moneter	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	759	- Bidang tentang agraria	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
7	760	BIDANG PEKERJAAN UMUM				
	761	- Bidang pengairan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	762	- Bidang jalan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	763	- Bidang jembatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	764	- Bidang Bangunan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	765	- Bidang tata kota	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	766	- Bidang lingkungan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	767	- Bidang ketenagaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	Bidang teknis

					fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	
	768	- Bidang peralatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	769	- Bidang air minum	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
8	780	BIDANG KEPEGAWAIAN				
	781	- Bidang pengadaan pegawai	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	782	- Bidang mutasi pegawaia	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	783	- Bidang kedudukan pegawai	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	784	- Bidang kesejahteraan pegawai	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	785	- Bidang cuti	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	786	- Bidang penilaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	787	- Bidang Tata Usaha Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat	Bidang

					mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	teknis
	788	- Bidang pemberhentian pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	789	- Bidang pendidikan pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
9	790	BIDANG KEUANGAN				
	791	- Bidang Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	792	- Bidang Otorisasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	793	- Bidang verifikasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	794	- Bidang pembukuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	795	- Bidang Perbendaharaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	796	- Bidang pembinaan Kebendaharaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis

	797	- Bidang Pendapatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	798	- Bidang Perbendaharaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



SYAHRIL,SH,MH
Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

FADLY AMRAN

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN
DAN AKSES ARSIP DINAMIS

X. KEUANGAN

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
1	901	Nota Keuangan - Berkas pengantar nota keuangan APBD perubahan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	902	APBN	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	903	APBN, RAPBD - Hibah - Bantuan Sosial	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	904	Dana Alokasi Umum - Berkas pengajuan - penyusunan DAU - Laporan	Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	905	Dana Alokasi Khusus - Berkas Pengajuan - penggunaan DAK - Laporan - Dana bagi hasil	Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	906	Dana cadangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	907	Penetapan dan prioritas plafon anggaran, penetapan prioritas anggaran sementara.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang

	908	Kebijakan alokasi umum, nota kesepakatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
2	910	ANGGARAN				
	911	Rutin/ Murni <ul style="list-style-type: none"> - ABDD murni mulai dari perencanaan program di DPRD sampai penetapan perda PBD 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	912	Pembangunan /kegiatan <ul style="list-style-type: none"> - pengusulan anggaran pembiayaan/ kegiatan - penggunaan 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	913	Anggaran belanja tambahan / Anggaran perubahan APBD <ul style="list-style-type: none"> - mulai dari perencanaan sampai penetapan perubahan APBD 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	914	Daftar isian kegiatan (DIK) Renaca kegiatan Anggaran (RKA) <ul style="list-style-type: none"> - daftar usulan kegiatan (DUK) - Pengusulan pra RKA - pengusulan RKA - Pembahasan 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	915	Daftar isian proyek (DIP) /dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) <ul style="list-style-type: none"> - Daftar usulan proyek - daftar isian pengguna anggaran (DIPA) 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	916	Revisi Anggaran / Penyempurnaan APBD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang

		- Pengusulan realisasi APBD				
	917	Pembiayaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	918	Belanja langsung/ tidak langsung	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
3	920	OTORISASI/ SKO/ Surat Penyediaan Dana (SPD)				
	921	Rutin/ Murni	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	922	Pembangunan/ kegiatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	923	SIAP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	924	Ralat/ SKO/ Revisi Surat Penyediaan Dana (SPD)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
4	930	VERIFIKASI				
	931	SPM Rutin (daftar p8)/ SPM Murni/ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	932	SPM Pembangunan (daftar p8)/ SPM Murni/ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kegiatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	933	Penerimaan (daftar p6.p7)/ pendapatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	934	SPJ Rutin/ SPJ Murni	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	935	SPJ Pembangunan/ SPJ Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat	Sekretariat

					mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	bidang
	936	Nota Pemeriksaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	937	SP Pemindahan pembukuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
5	940	PEMBUKUAN				
	941	Penyusunan perhitungan anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	942	Permintaan Data Anggaran Laporan Fisik Pembangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	943	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SKAD) - Neraca - catatan anggaran laporan keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
6	950	PERBENDAHARAAN				
	951	Tuntutan Ganti rugi (ICW pasal 74/ Tuntutan perbendaharaan Tuntutan ganti rugi (TPTGR)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	952	Tutututan Bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	953	Penghapusan kekayaan daerah - aset daerah - aset bergerak - aset tidak bergerak - aset tidak berwujud	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	954	Pengangkatan / penggantian pimpinan proyek/ PPTK dan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang

		pengangkatan/ Pemberhentian bendaharawan				
	955	Specimen tanda tangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	956	Surat tagihan piutang ,	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	957	Sisa lebih pembiayaan Anggaran (SILPA)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
7	960	PEMBINAAN KEBENDAHARAAN				
	961	Pemeriksaan kas dan hasil pemeriksaan kas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	962	Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	963	Laporan keuangan bendaharawan - Laporan keuangan bulanan - laporan keuangan tahunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
8	970	PENDAPATAN - Pendapatan asli daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	971	Perimbangan keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	972	Subsidi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	973	Pajak, ipeda, IHH,IHPH,PBB	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	974	Retribusi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi	Sekretariat bidang

					dan tugas	
	975	Bea	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	976	Cukai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	977	Pungutan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	978	Bantuan Presiden, Mentri, Bantuan propinsi, bantuan pemerintah, dan bantuan lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	979	Pendapatan perusahaan milik negara/ Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
9	980	Sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
10	990	BENDAHARAWAN				
	991	SKPP/SPP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	992	Teguran SPJ	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang

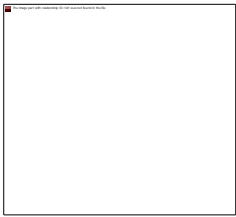
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM

SYAHRIL, SH, MH
 Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

FADLY AMRAN



W_L
PER
TENTANG
PEDOMAN SISTEM KL
DENG_L

Menimbang : a.

b.

c.

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

5.

WALIKOTA Pariaman DAERAH ISTIMEWA Pariaman

PERATURAN WALIKOTA Pariaman NOMOR 35 TAHUN 2017

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PARIAMAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA Pariaman,

bahwa arsip adalah sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya, sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip;

bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Pariaman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5071);

OTA Pariaman

Lampiran I : Peraturan Walikota Pariaman

Nomor : Tahun 2018

Tentang : Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman

I. UMUM

NO	KLASIFI KASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	000	UMUM				
	001	Lambang	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	001.1	Garuda				
	001.2	Bendera Kebangsaan				
	001.3	Lagu Kebangsaan				
	001.4	Daerah				
		1. Provinsi				
		2. Kabupaten/ Kota				
	002	Tanda kehormatan /penghargaan untuk pegawai lihat 861.1	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	002.1	Bintang				
	002.2	Satyalencana				
	002.3	Samkarya Nugraha				
	002.4	Monumen				
	002.5	Penghargaan secara adat				
	002.6	Penghargaan lainnya				
	003	Hari Raya/ Besar	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	003.1	Hari Besar Nasional, Hari Pahlawan dan sebagainya				
	003.2	Hari Raya Keagamaan				
	003.3	Hari Ulang Tahun				
	003.4	Hari Besar Internasional				
	004	Ucapan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	004.1	Ucapan Terima kasih			mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	
	004.2	Ucapan Selamat				
	004.3	Ucapan Bela sungkawa				
	004.4	Ucapan lainnya				
	005	Undangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	006	Tanda Jabatan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	006.1	Pamong Praja				
	006.2	Tanda Pengenal				
	006.3	Pejabat lainnya				
	007	Himbauan/ Seruan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
2	010	URUSAN DALAM				
		Gedung Kantor termasuk instalasi Prasarana Fisik Pamong	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja	Bidang Teknis
	011	Kantor/ Dinas	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	012	Rumah Dinas	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	012.1	Tanah Untuk rumah dinas				
	012.2	Perabot Rumah Dinas				
	012.3	Rumah Dinas Golongan 1				
	012.4	Rumah Dinas Golongan 2				
	012.5	Rumah Dinas Golongan 3				

1	2	3	4	5	6	7
	013	Mess/ Guest House / Asrama	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	014	Rumah Susun/ Apartemen	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	015	Penerangan Listrik/ Jasa Listrik	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	016	Telepon/Faximili/Internet	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	017	Keamanan / Ketertiban Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	018	Kebersihan Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	019 019.1 019.2	Protokol Upacara Bendera Tata Tempat 1. Pemasangan Gambar Presiden/Wapres	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	019.3 019.4	Audiensi/ menghadap pimpinan Alamat- alamat kantor Pejabat				

1	2	3	4	5	6	7
	019.5	Bandir/ umbul-umbul/ Spanduk				
3	020	PERALATAN				
	020.1	Penawaran	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	021	Alat Tulis	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	022	Mesin Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	023	Perabot Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	024	Alat Angkutan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	025	Pakaian Dinas	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	026	Senjata	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	027	Pengadaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	028	Inventaris, Ketata usahaan barang (Kartu Inventaris Barang/ Kartu Inventaris Ruangan)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
4	030	KEKAYAAN DAERAH				
		Meliputi: Barang bergerak dan barang tidak bergerak				
	031	Sumber Daya Alam	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	032	Aset Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
5	040	PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI, KEARSIPAN DAN SANDI				
	041 041.1	Perpustakaan Deposit (Seperti: Karya Cetak, Karya Rekam, Bibliografi, Katalog Induk Daerah, Pengolahan Bahan Pustaka, Daftar Tambah Buku dll)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	041.2	Layanan Perpustakaan dan Pelestarian Bahan Pustaka				

1	2	3	4	5	6	7
	041.3 041.4	(Seperti: Layanan Informasi, Promosi dan Permasyarakatan Perpustakaan, Perawatan, Bahan Pustaka, Bahan Perindustrian, Stock Opname, Bimbingan Pustaka, Pustaka Keliling, dll) Pembinaan Perpustakaan Penyiapan Bahan Perpustakaan				
	042	Dokumentasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	045 045.1 045.2 045.3	Kearsipan Pola Klasifikasi Penataan Berkas Penyusutan Arsip 1. JRA 2. Pemindahan Arsip 3. Penilaian Arsip 4. Pemusnahan Arsip 5. Penyerahan Arsip 6. Berita Acara Penyusutan Arsip 7. Daftar Pencarian Arsip	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	045.4 045.5 045.6	Pembinaan Kerasipan 1. Bimbingan Teknis Pemeliharaan/ Perawatan Arsip Pengawetan / Fumigasi				
	046	Sandi	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak keamanan <u>Rahasia Negara</u>	Bidang Teknis
	047	Website	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak keamanan <u>Rahasia Negara</u>	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	048	Pengelolaan data	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak keamanan Rahasia Negara	Bidang Teknis
	049	Jaringan Komunikasi data	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak keamanan Rahasia Negara	Bidang Teknis
6	050	PERENCANAAN				
	050.1	Repelita/ 8 Sukses 1. Pelita Daerah 2. Bantuan Pembangunan Daerah 3. Bappeda	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	051	Bidang Pemerintahan, Klasifikasikan disini: Proyek Prasarana fisik pemerintahan, Contoh: Proyek Kepenjaraan 051.86	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	052	Bidang Politik (Tambahkan Rincian 200 pada 052)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	053	Bidang Keamanan/ Ketertiban (Tambahkan Rincian 300 pada 053) Contoh: Proyek Ketataprajaan 053.311	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	054	Bidang Kesejahteraan Rakyat (Tambahkan Rincian 400 pada 054) Contoh: Proyek Resetlement Desa 054.671	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	055	Bidang Perekonomian (Tambahkan Rincian 500 pada 055)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
		Contoh: Proyek Pasar 055.112			Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	
	056	Bidang Pekerjaan Umum /Ketenagaan (Tambahkan Rincian 600 pada 056) Contoh: Proyek Jembatan 056.3	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	057	Bidang Pengawasan (Tambahkan Rincian 700 pada 057)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	058	Bidang Kepegawaian (Tambahkan Rincian 800 pada 058)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	059	Bidang Keuangan (Tambahkan Rincian 900 pada 059)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
7	060	ORGANISASI/ KETATALAKSANAAN				
	060.1	Program Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	061	Organisasi Instansi Pemerintah (Struktur Organisasi)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	062	Organisasi Badan Non Pemerintah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	063	Organisasi Badan Internasional	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	064	Organisasi Badan Semi Pemerintah, BKS-AKSI	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	065	Ketatalaksanaan/ Tata naskah/Sistem	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	066	Stempel Dinas	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	067	Pelayananan Umum/Pelayanan publik/ Analisis	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	068	Komputerisasi/ Siskomdagri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	069	Standar Pelayanan Minimal	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
8	070	PENELITIAN				
	071	Riset	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	072	Survei	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	073	Kajian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	074	Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	075	Kementerian Lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	076	Non Kementerian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	077	Provinsi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	078	Kabupaten/Kota	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	079	Kecamatan/Desa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
9	080	KONFERENSI (RAPAT/SEMINAR)				
	081	Gubernur	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	082	Bupati/Walikota	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	083	Komponen, eselon lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	084	Instansi Lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	085	Internasional di dalam Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	086	Internasional di luar Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
10	090	PERJALANAN DINAS				
	091	Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	092	Perjalanan Menteri ke Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	093	Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	094	Perjalanan Pegawai, termasuk pemanggilan Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	095	Perjalanan Tamu Asing ke Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	096	Perjalanan Presiden dan Wakil Presiden Keluar Negeri	-	-	-	-
	097	Perjalanan Menteri ke luar Negeri	-	-	-	-
	098	Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri	-	-	-	-
	099	Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS, R

Lampiran II : Peraturan Walikota Pariaman
Nomor : Tahun 2018
Tentang : Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman

II. PEMERINTAHAN

NO	KLASIFI KASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	100	PEMERINTAHAN				
		(Seperti: Tata Praja, Legislatif, Yudikatif, Hubungan Luar Negeri, dll)				
	101	Negeri	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	102	GDN	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
2	110	PEMERINTAH PUSAT				
	111	Presiden	-	-	-	-
	111.1	Meliputi: Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, dan serah jabatan				
	111.2	Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR				
	111.2	Amanat Presiden/ Amanat Kenegaraan/ Pidato				
	112	Wakil Presiden	-	-	-	-
	112.1	Meliputi: Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, dan serah jabatan				
	112.1	Pertanggungjawaban Wakil Presiden kepada MPR				

1	2	3	4	5	6	7
	112.2	Amanat Wakil Presiden/ Amanat Kenegaraan/ Pidato				
	113	Kabinet	-	-	-	-
	114	Departemen Dalam Negeri	-	-	-	-
	115	Departemen Lainnya	-	-	-	-
	116	Lembaga Pemerintahan Non Departemen	-	-	-	-
	117	Lembaga Pemerintah	-	-	-	-
3	120	PEMERINTAH PROVINSI				
	12.04	Penyusunan Laporan Daerah	-	-	-	-
	120.1	2. Monografi Koordinasi				
	120.2	Instansi Tingkat Provinsi				
		1. Dinas Otonomi				
		2. Instansi Vertikal				
		3. Kerjasama Antar Provinsi/ Daerah				
	121	Gubernur tambahkan kode Wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, meninggal, pelantikan, pemberhentikan, Serah Terima jabatan dan sebagainya	-	-	-	-
	122	Wakil Gubernur tambahkan kode Wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, meninggal, pelantikan, pemberhentikan, Serah Terima jabatan dan sebagainya	-	-	-	-
	123	Sekretariat Wilayah tambahkan kode Wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, meninggal, pelantikan, pemberhentikan, Serah Terima jabatan dan	-	-	-	-
	124	Pembentukan / Pemekaran Wilayah Pembinaan /Perubahan Nama Kepada: Daerah, Kota, Benda	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	124.1	Geografis, Gedung, Sungai, Pulau, dan Sebagainya	-	-	-	-
	124.2	Pemekaran Wilayah				
	124.3	Forum Koordinasi lainnya				
	125	Pembentukan Pemekaran Wilayah Pembinaan /Perubahan Nama Kepada: Daerah, Kota, Benda	-	-	-	-
	125.1	Geografis, Gunung, Sungai dan sebagainya				
	125.2	Pembentukan Wilayah				
	125.3	Pemindahan Ibukota				
	125.4	Perubahan Batas Wilayah				
	125.5	Pemekaran Wilayah				
	126	Pembagian Wilayah	-	-	-	-
	127	Penyerahan Urusan	-	-	-	-
	128	Swapraja/ Penataan Wilayah/ daerah	-	-	-	-
	128	Swapraja/ Penataan Wilayah/ daerah	-	-	-	-
4	130	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-
	131	Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan (Seperti: Bupati/Walikota, Wakil Bupati/ Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, dll)	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	132	Badan-Badan Pertimbangan Daerah	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	133	Pembentukan/Pemekaran Wilayah (Seperti: Pemberian/Perubahan nama Daerah, Benda, Geografis, Gunung, Sungai, Pulau, Selat, dsb)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	134	Pembagian Wilayah	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	135	Penyerahan Urusan/ Pelimpahan Kewenangan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	136	Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	136.1	Sambutan/Pengarahan / Amanat				
	136.2	Pembentukan Kecamatan				
	136.3	Pemekaran Kecamatan				
	136.4	Perluasan / Perubahan Batas Wilayah Kecamatan				
	136.5	Pembentukan Perwakilan Kecamatan				
5	140	PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN				
	140.1	Pamong Desa, meliputi: Pencalonan, Pemilihan, Meninggal Pembentukan Pemerintahan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	141	Pengakatan, Pemberhentian	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	142	Penghasilan Pamong Desa	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	143	Kekayaan Desa	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	144	Dewan Tingkat Desa, Dewan Marga, Rembug Desa	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	145	Administrasi Desa	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit kerja	Bidang Teknis
	146 146.1 146.2 146.3 146.4 146.5	Kewilayahan Pembentukan Desa/Kelurahan Pemekaran Desa Perubahan Batas Wilayah/Perluasan Desa/ Kelurahan Perubahan Nama Desa/Kelurahan Kerjasama antar Desa/Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	147	Lembaga-lembaga Tingkat Desa Jangan Klasifikasikan disini, lihat 410 dengan perinciannya	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	148 148.1 148.2 148.3	Perangkat Kelurahan Kepala Kelurahan Sekretaris Kelurahan Staf Kelurahan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	149 149.1 149.2 149.3	Dewan Kelurahan Rukun Tetangga Rukun Warga Rukun Kampung	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
6	150	LEGISLATIF MPR/DPR				
	151	Keanggotan MPR	-	-	-	-
	151.1	Pencalonan				
	151.2	Pemberhentian				
	151.3	Recall				
	151.4	Pelanggaran				
	152	Persidangan	-	-	-	-
	153	Kesejahteraan	-	-	-	-
	153.1	Keuangan				
	153.2	Penghargaan				
	154	Hak	-	-	-	-
	155	Keanggotaan DPR Pencalonan Pengangkatan	-	-	-	-
	156	Persidangan	-	-	-	-
	157	Kesejahteraan	-	-	-	-
	157.1	Keuangan				
	157.2	Penghargaan				
	158	Jawaban Pemerintah	-	-	-	-
	159	Hak	-	-	-	-
7	160	DPRD PROVINSI				
	161	Keanggotaan (Meliputi : Pencalonan, pengangkatan, Pemberhentian, Pelanggaran)	-	-	-	-
	162	Persidangan/ Rapat (Paripurna/ Pleno, Komisi/ Fraksi, Rapat lainnya, Reses dll)	-	-	-	-
	163	Kesejahteraan (Seperti: Keuangan, Penghargaan, dll)	-	-	-	-
	164	Hak	-	-	-	-
	165	Sekretaris DPRD Provinsi	-	-	-	-
	166	Badan Kelengkapan Dewan	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		(Seperti: Badan kehormatan, Tim Kerja dan Kelengkapan Dewan lainnya)				
8	170	DPRD KABUPATEN/KOTA				
	171	Keanggotaan (meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian, Pelanggaran)	Biasa/Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	172	Persidangan/ Rapat (Meliputi: Paripurna/ Pleno, Komisi/Fraksi, Rapat lainnya, Reses)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	173	Kesejahteraan (Meliputi: Keuangan, Penghargaan)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	174	Hak	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	175	Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	176	Badan Kelengkapan Dewan Termasuk Badan Kehormatan, Tim Kerja dan Kelengkapan Dewan lainnya.	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
9	180	HUKUM				

1	2	3	4	5	6	7
	180.1	Konstitusi (Meliputi: Dasar Negara, Undang-Undang Dasar)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	181	Peradilan (Meliputi: Peradilan Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Agama, Konstitusi, Militer, HAM, Internasional)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	182	Hukum Adat	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	185	Imigrasi (Meliputi: Visa, Passport, Exit, Reentry, Lintas Batas)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	186	Lembaga Pemasyarakatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	188	Peraturan Perundang-undangan (Meliputi: TAP MPR, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	189 189.1	Keputusan (Meliputi: Menteri, Lembaga Non Departemen, Lembaga Lainnya) Instruksi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
		(Meliputi: Presiden, Menteri, Lembaga Non Departemen, Gubernur, Bupati/ Walikota)				
10	190	HUBUNGAN LUAR NEGERI				
		(Meliputi: Perwakilan Asing, Kerjasama Luar Negeri, dll)				
	193 193.1	Kerjasama dengan Negara Asing Bilateral dan Multilateral	-	-	-	-
	194	Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri	-	-	-	-
	195	Laporan Luar Negeri	-	-	-	-

WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS, R

Lampiran III : Peraturan Walikota Pariaman
Nomor : Tahun 2018
Tentang : Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman

III. POLITIK

NO	KLASIFI KASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		5	6	7
1	200	POLITIK				
	201	Kebijakan Umum Meliputi : Kebijakan Umum di Bidang Politik baik Tingkat Pusat maupun Daerah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	202	Orde Baru	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	203	Reformasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
2	210	KEPARTAIAN				
	211	Lambang Partai	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3		5	6	7
	212	Kartu Tanda Anggota	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	213	Bantuan Keuangan Parpol	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
3	220	ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
	221 221.1 221.2 221.3	Perjuangan Perintis kemerdekaan Angkatan Veteran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	222 222.1 222.2	Kekaryaan Pepabri Wredatama	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	223	Keagamaan (Muhammadiyah, NU, Persatuan Tarikat Islam, dll)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	224	Kedaerahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3		5	6	7
	225	Lembaga Swadaya Masyarakat (Seperti: P.K.D.P, Y.L.K.I, dll)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	226	Organisasi Kemasyarakatan Lainnya Seperti: Yayasan Jantung, dll)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
4	230	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL				
	231	Organisasi Kesehatan (Seperti: IDI,IBI, dll)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	232	Organisasi Guru (Seperti : Persatuan Guru Republik Indonesia, dll)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	233	Organisasi Sarjana (Seperti : Ikatan Sarjana Hukum Indonesia, dll)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	234	Organisasi Kepengacaraan (Seperti : Persatuan Advokat Indonesia, dll)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3		5	6	7
	235	Organisasi Fungsional (Seperti: Asosiasi Arsiparis, Pustakawan, Notaris, dll)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	236	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	237	Organisasi Wartawan Indonesia (Seperti: Persatuan Wartawan Indonesia, dll)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	238	Ikatan Cendekiawan Indonesia (Seperti: ICMI, dll)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	239	Organisasi Profesional dan Fungsional lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
5	240	ORGANISASI KEPEMUDAAN				
	241	Komite Nasional Pemuda Indonesia	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3		5	6	7
	242	Organisasi Mahasiswa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	243	Organisasi Pelajar	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	244	Organisasi Pemuda Keagamaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	245	Organisasi Pemuda Kepartaian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	246	Organisasi Kepemudaan lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
6	250	ORGANISASI BURUH, TANI, DAN NELAYAN				
	251	Organisasi Pekerja (Seperti: Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dll)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3		5	6	7
	252	Organisasi Buruh Internasional (Seperti: ILO, dll)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	253	Organisasi Tani Indonesia (Seperti: HKTI, dll)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	254	Organisasi Nelayan (Seperti: HNSI, dll)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
7	260	ORGANISASI PEREMPUAN				
	261	Dharma Wanita	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	262	Persatuan Wanita Indonesia	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	263	Pemberdayaan Perempuan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3		5	6	7
	264	Konggres Wanita	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
8	270	PEMILIHAN UMUM				
	271	Pencalonan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	272	Nomor urut Partai/ Tanda Gambar	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	273	Kampanye	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	274	Petugas Pemilu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	275	Pemilih / Daftar Pemilih	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3		5	6	7
	276	S a r a n a	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	276.1	T P S				
	276.2	Kendaraan				
	276.3	Surat suara				
	276.4	Kotak Suara				
	276.5	Dana				
	277	Pemungutan suara / Penghitungan suara	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	278	Penetapan Hasil Pemilu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	279	Penetapan Perolehan Jumlah Kursi dan dan Calon Pemilih	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
9	280	PENGUCAPAN SUMPAH JANJI MPR, DPR,				
		Pengucapan Sumpah Janji MPR, DPR, DPD	-	-	-	-
10	290					

WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS, R

1	2	3		5	6	7
---	---	---	--	---	---	---

Lampiran IV : Peraturan Walikota Pariaman

Nomor : Tahun 2018

Tentang : Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman

IV. KEAMANAN DAN KETERTIBAN

NO	KLASIFI KASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	300	KEAMANAN/KETERTIBAN				
	301	Keamanan Perbatasan Provinsi Kab/ Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	302	Ketertiban	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
2	310	PERTAHANAN				
	311	Darat	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bidang Teknis
	312	Laut	-	-	-	-
	313	Udara	-	-	-	-
	314	Perbatasan	-	-	-	-
3	320	KEMILITERAN				
	321	Latihan Militer	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	322	Wajib Militer	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bidang Teknis
	323	Operasi Militer	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bidang Teknis
	324	Kekaryaan TNI/Pejabat Sipil dan TNI	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bidang Teknis
4	330	KEAMANAN				
	331 331.1 331.2 331.3 331.4	Kepolisian Polisi Pamong Praja Kamra Kamling Jaga Wana	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bidang Teknis
	332	Huru hara/ Demonstrasi	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bidang Teknis
	333	Senjata Api Tajam	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bidang Teknis
	334	Bahan Peledak	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	335	Perjudian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	336	Surat- surat Kaleng	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bidang Teknis
	337	Pengaduan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	338	Himbauan / Larangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	339	Teroris	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bidang Teknis
5	340	PERTAHANAN SIPIL				
	341	Perlindungan Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
6	350	KEJAHATAN				

1	2	3	4	5	6	7
	351	Makar / Pemberontakan (Meliputi : Kerusuhan, Anarkis)	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bidang Teknis
	352	Pembunuhan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bidang Teknis
	353	Penganiayaan, Pencurian/ Perampasan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bidang Teknis
	354	Subversi/Penyelundupan/ Narkoba	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bidang Teknis
	355	Pemalsuan (Seperti : Uang, Ijazah, Dokumen Negara, Kejahatan Pemalsuan Lainnya)	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bidang Teknis
	356	Korupsi, Kolusi dan Nepotisme/Penyelewengan/Penyalahgunaan Jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	357	Perkosaan/Perbuatan Cabul	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	358	Kenakalan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	359	Kajahatan dan Pelanggaran Lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
7	360	BENCANA				
	361	Gunung berapi / gempa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	362	Banjir / tanah longsor	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	363	Angin Topan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	364 364.1	Kebakaran Pemadam Kebakaran	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	365	Kekeringan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
8	370	KECELAKAAN				
	371	D a r a t	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	372	L a u t	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	373	U d a r a	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	374	Sungai / Danau	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
9	380	KETERTIBAN				
	381	Kampanye (Meliputi: Himbauan, Pemasangan Spanduk, Ketertiban)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	382	Pembinaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
	383	Penyelidikan dan Penindakan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	384	Pelanggaran Meliputi: Razia, Sanksi-sanksi, Penyelesaian Perkara	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Bidang Teknis
10	390					

WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS, R

Lampiran V : Peraturan Walikota Pariaman

Nomor : Tahun 2018

Tentang : Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman

V. KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KLASIFI KASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	400	KESEJAHTERAAN RAKYAT				
	401	Keluarga Miskin	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	402	PNPM Mandiri Pedesaan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
2	410	PEMBANGUNAN DESA/ KELURAHAN				
	411	Pembinaan Usaha Gotong Royong	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	411.1	Swadaya Gotong Royong				
		1. Penataan Gotong Royong				
		2. Gotong Royong Dinamis				
		3. Gotong Royong Statis				
		4. Pungutan				
	411.2	Lembaga Sosial Desa (LSD)				
		1. Pembinaan				
		2. Klasifikasi				
		3. Proyek				
		4. Musyawarah				
	411.3	Latihan Kerja Masyarakat				

1	2	3	4	5	6	7
		1. Kader Masyarakat 2. Kuliah Kerja Nyata (KKN) 3. Pusat latihan 4. Kursus-kursus 5. Kurikulum/silabus 6. Keterampilan 7. Pramuka				
	411.4	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)				
	411.5	1. Program 2. Pembinaan Organisasi 3. Kegiatan Penyuluhan				
	411.6	1. Publikasi 2. Peragaan 3. Sosio Drama 4. Siaran Pedesaan 5. Penyuluhan Lapangan Kelembagaan Desa 1. Kelompok Tani 2. Rukun Tani 3. Subak 4. Dharma Tirta				
	412	Perekonomian Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	412.1	Produksi Desa				
	412.2	1. Pengolahan 2. Pemasaran Keuangan Desa 1. Perkreditan Desa 2. Inventarisasi Desa 3. Perkembangan/ pelaksanaan 4. Bantuan/Stimulans				

1	2	3	4	5	6	7
	412.3	5. Petunjuk/pembinaan pelaksanaan Koperasi Desa 1. Badan Usaha Unit Desa (BUUD) 2. Koperasi Usaha Desa				
	412.4	Penataan Bantuan Pembangunan Desa 1. Jumlah desa yang diberi bantuan 2. Pengarahan 3. Pusat 4. Daerah				
	412.5	Alokasi Bantuan Pembangunan Desa				
	412.6	Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa				
	413	Prasarana Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	413.1	Prasarana Desa 1. Pembinaan 2. Bimbingan teknis				
	413.2	Pemukiman Kembali Penduduk 1. Lokasi 2. Diskusi 3. Pelaksanaan				
	413.3	Masyarakat Pradesa 1. Pembinaan 2. Penyuluhan				
	413.4	Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa 1. Rumah sehat 2. Proyek perintis 3. Pelaksanaan 4. Pengembangan 5. Perbaikan kampung				
	413.5	Lingkungan Hidup				

1	2	3	4	5	6	7
	414	Pengembangan Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	414.1	Tingkat Perkembangan Desa				
	414.2	Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP)				
	414.3	Tata Desa				
	414.4	Perlombaan Desa				
	415	Koordinasi Internal dan Eksternal	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
3	420	PENDIDIKAN				

1	2	3	4	5	6	7
	421	Sekolah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	421.1	Pra Sekolah				
	421.2	Sekolah Dasar				
	421.3	Sekolah Menengah				
	421.4	Sekolah Tinggi				
	421.5	Sekolah Kejuruan				
	421.6	Kegiatan Sekolah				
	421.7	Kegiatan Pelajar				
		1. Reuni Darmawisata				
		2. Pelajar teladan				
		3. Resimen Mahasiswa				
	421.8	Sekolah Pendidikan Luar Biasa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	421.9	Pendidikan Luar Sekolah /Pemberantasan Buta Huruf				
	422	Administrasi Sekolah				
		Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran				
	422.1	Mapras, Perpeloncoan				
	422.2	Tahun Pelajaran				
	422.3	Hari Libur				
	422.4	Uang Sekolah, Klasifikasikan disini SPP				
	422.5	Beasiswa				
	423	Metode Belajar	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	423.1	Kuliah				
	423.2	Ceramah, simposium				
	423.3	Diskusi				
	423.4	Kuliah lapangan, Widyawisata, KKN, Studi Tur				
	423.5	Kurikulum				
	423.6	Karya Tulis				
	423.7	Ujian				

1	2	3	4	5	6	7
	424	Tenaga Pengajar (Seperti : Guru, Dosen, Instruktur, dll)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	425 425.1 425.2 425.3	Sarana Pendidikan Gedung 1. Gedung sekolah 2. Kampus 3. Pusat kegiatan mahasiswa Buku Perlengkapan Sekolah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	426 426.1 426.2 426.3 426.4	Keolahragaan Cabang Olah Raga Sarana 1. Gedung olah raga 2. Stadion 3. Lapangan 4. Kolam renang Pesta Olah Raga : PON, Porsade, Olimpiade, dsb KONI	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	427	Kepemudaan/ Kegiatan Remaja (Seperti: Karang Taruna, Pertukaran Pemuda, Remaja Masjid, dll.	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	428	Kepramukaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	429	Sanggar Kegiatan Belajar	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
4	430	KEBUDAYAAN				
	431	Kesenian (Meliputi: Sarana dan Kegiatan Kesenian)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	432	Kepurbakalaan (Seperti : Museum, Peninggalan Bersejarah, dll)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	433	Sejarah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	434	Bahasa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	435	Usaha Pertunjukan, Hiburan Kesenangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	436	Kepercayaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	437	Legenda	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	438	Adat Istiadat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
5	440	KESEHATAN				
	441	Pembinaan Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	441.1	Gizi				
	441.2	Mata				
	441.3	Jiwa				
	441.4	Kanker				
	441.5	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)				
	441.6	Perawatan				
	441.7	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM.				
	441.8	Pekan Imunisasi Nasional (PIN)				
	442	Obat-Obatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	422.1	Pengadaan				
	422.2	Penyimpanan				
	443	Penyakit Menular	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	443.1	Pencegahan				
	443.2	Pemberantasan, Pencegahan Penyakit Menular Langsung				
		1. Kusta				
		2. Kelamin				
		3. Frambusia				
		4. TBC/AIDS/HIV				

1	2	3	4	5	6	7
	443.3	Epidemiologi 1. Kolera 2. Imunisasi 3. Survey Lense 4. Rabies/Anjing gila				
	443.4	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung 1. Malaria 2. Demam Berdarah HDF 3. Filaria 4. Serangga				
	443.5	Higiene/Sanitasi Lingkungan 1. Tempat-tempat Pembuatan dan penjualan makanan dan minuman 2. Sarana air minum dan jamban keluarga (Samijaga) 3. Pestisida				
	444	Gizi				
	444.1	Kekurangan Makanan, Bahaya Kelaparan, Busung Lapar	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	444.2	Keracunan Makanan				
	444.3	Menu Makanan Rakyat				
	444.4	Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD)				
	444.5	Program Makan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas				
	445	Puskesmas Keliling, Ploklitik	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	446	Tenaga Medis	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	447	Alat Medis	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	448	Pengobatan Tradisional	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	448.1	Pijat				
	448.2	Tusuk Jarum				
	448.3	Jamu Tradisional				
	448.4	Dukun/Paranormal				
6	450	AGAMA				
	451	Islam	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	451.1	Peribadatan				
		1. Sholat				
		2. Zakat Fitrah				
		3. Puasa				
		4. MTQ				
	451.2	Rumah Ibadah				
	451.3	Tokoh Agama				
	451.4	Pendidikan				
		1. Tinggi				
		2. Menengah				
		3. Dasar				
		4. Pondok Pesantren				
		5. Gedung Sekolah				
		6. Tenaga Pengajar				
		7. Buku				
		8. Dakwah				

1	2	3	4	5	6	7
		9. Organisasi/Lembaga Pendidikan				
	452	Protestan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	452.1	Peribadatan				
	452.2	Rumah Ibadah				
	452.3	Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta,				
	452.4	Domine				
	452.5	Mazhab				
	452.5	Organisasi gerejani				
	453	Katolik	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	453.1	Peribadatan				
	453.2	Rumah ibadah				
	453.3	Tokoh agama, rohaniawan, Pendeta, Pastor				
	453.4	Mazhab				
	453.5	Organisasi gerejani				
	454	Hindu	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	454.1	Peribadatan				
	454.2	Rumah Ibadah				
	454.3	Tokoh agama, Rohaniawan				
	454.4	Mazhab				
	454.5	Organisasi keagamaan				
	455	Budha	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	455.1	Peribadatan				
	455.2	Rumah ibadah				
	455.3	Tokoh agama, rohaniawan				
	455.4	Mazhab				
	455.5	Organisasi keagamaan				
	456	Urusan Haji	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	456.1	ONH				
	456.2	Manasik				
	457	Agama Lainnya	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
		(Meliputi: Peribadatan, Rumah Ibadah, Tokoh Agama, Organisasi Keagamaan)			mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	
7	460	SOSIAL				
	461	Rehabilitasi Penderita Cacat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	461.1	Cacat Mata				
	461.2	Cacat tubuh				
	461.3	Cacat mental				
	461.4	Bisu /tuli				
	462	Tuna Susila	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	462.1	Gelandangan				
	462.2	Pengemis				
	462.3	Tuna susila				
	462.4	Anak Nakal				
	463	Kesejahteraan Anak/ Keluarga	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	463.1	Anak Putus Sekolah				
	463.2	Ibu teladan				
	463.3	Anak asuh				
	464	Pembinaan Pahlawan Meliputi : Penghargaan Kepada Pahlawan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	464.1	Tunjangan kepada pahlawan dan jandanya Perintis kemerdekaan Meliputi : Pembinaan dan Penghargaan				
	464.2	Tunjangan kepada Perintis				
	464.3	Cacat Veteran				
	465	Kesejahteraan Sosial	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	465.1 465.2	Lanjut Usia Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi			mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	
	466 466.1 466.2 466.3 466.4	Sumbangan Sosial Korban Bencana Pencarian Dana untuk Sumbangan Meliputi: Penyelenggaraan undian, Ketangkasan, Bazar Panti Asuhan Panti Jompo	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	467 467.1	Bimbingan Sosial Masyarakat suku terasing meliputi: Bimbingan, Pendidikan Kesehatan, Pemukiman	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	468	Palang Merah Indonesia	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	469 469.1 469.2 469.3 469.4	Makam Umum Pahlawan Khusus keluarga raja Krematorium	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
8	470	KEPENDUDUKAN				
	471 471.1	Pendaftaran Penduduk Identitas Penduduk 1. Biodata 2. Nomor Induk Kependudukan 3. Kartu Tanda Penduduk	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat megganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
		4. Kartu Keluarga 5. Advokasi Identitas Penduduk				

1	2	3	4	5	6	7
	471.2	Perpindahan Penduduk dalam Wilayah Indonesia 1. Perpindahan penduduk WNI 2. Perpindahan penduduk WNA dalam wilayah Indonesia 3. Perpindahan penduduk WNA dan WNI tinggal sementara 4. Daerah Terbelakang 5. Bedol desa				
	471.3	Perpindahan Penduduk Antar Negara 1. Penduduk Indonesia ke luar negeri 2. Orang asing tinggal sementara 3. Orang asing tinggal tetap 4. Perpindahan penduduk antar Negara di wilayah perbatasan antar Negara (pelintas batas tradisional)				
	471.4	Pendaftaran Pengungsi dan Penduduk Rentan 1. Akibat bencana alam 2. Akibat kerusakan sosial 3. Pendaftaran penduduk daerah terbelakang 4. Pendaftaran penduduk rentan				
	472 472.1	Pencatatan Sipil Kelahiran, Kematian, dan Advokasi 1. Kelahiran 2. Kematian 3. Advokasi kelahiran dan kematian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	472.2	Perkawinan, Perceraian, dan Advokasi 1. Perkawinan agama Islam 2. Perkawinan agama non Islam				

1	2	3	4	5	6	7
	472.3	3. Perceraian agama Islam 4. Perceraian agama non Islam 5. Advokasi perkawinan dan perceraian Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta dan Advokasi 1. Pengangkatan anak 2. Pengakuan anak 3. Pengesahan anak 4. Perubahan anak 5. Pembatalan anak 6. Advokasi pengelolaan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan Akta				
	472.4	Pencatatan Kewarganegaraan 1. Akibat perkawinan 2. Akibat kelahiran 3. Non perkawinan 4. Non kelahiran 5. Perubahan WNI ke WNA				
	473 473.1	Informasi Kependudukan Teknologi Informasi 1. Perangkat keras 2. Perangkat lunak 3. Jaringan komunikasi data	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	473.2	Kelembagaan dan Sumber Daya Informasi 1. Daerah maju 2. Daerah berkembang				
	473.3	3. Daerah terbelakang Pengolahan Data Kependudukan 1. Pendaftaran penduduk 2. Kejadian vital penduduk				

1	2	3	4	5	6	7
	473.4	3. Penduduk non registrasi Pelayanan Informasi Kependudukan 1. Media elektronik 2. Media cetak 3. Outlet				
	474 474.1	Perkembangan Penduduk Pengarahan Kuantitas Penduduk 1. Struktur jumlah 2. Komposisi 3. Fertilitas 4. Kesehatan reproduksi 5. Morbiditas penduduk 6. Mortalitas penduduk	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	474.2	Pengembangan Kuantitas Penduduk 1. Anak dan remaja 2. Penduduk usia produktif 3. Penduduk lanjut usia 4. Gender				
	474.3	Penataan Persebaran Penduduk 1. Migrasi antar wilayah 2. Migrasi Internasional 3. Urbanisasi 4. Sementara 5. Migrasi non permanen				
	474.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk				
		1. Pengembangan sistem perlindungan penduduk 2. Pelayanan kelembagaan ekonomi 3. Pelayanan kelambagaan sosial budaya 4. Partisipasi masyarakat				

1	2	3	4	5	6	7
	474.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan 1. Pendidikan jalur sekolah 2. Pendidikan jalur luar sekolah 3. Pendidikan jalur masyarakat 4. Pembangunan berwawasan kependudukan				
	475	Proyeksi dan Penyerasian kebijakan kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	475.1	Indikator Kependudukan Perumusan penetapan dan pengembangan indikator kependudukan 1. Kependudukan 2. Pemanfaatan indikator kependudukan 3. Sosialisasi indikator kependudukan				
	475.2	Proyeksi Kependudukan 1. Penyusunan dan pengembangan proyeksi kependudukan 2. Pemanfaatan proyeksi kependudukan				
	475.3	Analisis Dampak Kependudukan 1. Penyusunan dan pengembangan analisis dampak kependudukan 2. Pemanfaatan analisis dampak kependudukan				
	475.4	Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah				
	475.5	1. Lembaga Internasional 2. Lembaga masyarakat dan nirlaba 3. Lembaga usaha swasta Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah 1. Lembaga pemerintah 2. Pemerintah provinsi dan kota				

1	2	3	4	5	6	7
	475.6	3. Pemerintah Kabupaten Analisis				
	476	Monitoring	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	477	Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	478	Dokumentasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
9	480	HUMAS				
	481 481.1 481.2 481.3 481.4	Penerbitan Surat kabar Majalah Buku Penerjemahan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	482 482.1	Radio RRI 1. Siaran Pedesaan jagan di klasifikasikan disini	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
		2. Non RRI 3. Luar negeri				
	483	Televisi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	484	Film	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	485 485.1 485.2 485.3	Pers Kewartawanan Wawancara Informasi Nasional	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	486	Grafika	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	487 487.1	Penerangan Pameran non komersil	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	488	Operation Room	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	489	Hubungan Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
10	490	PENGADUAN MASYARAKAT				
		Pengaduan Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS, R

1	2	3	4	5	6	7
	898.6	Uang Ujian				
	898.7	Uang Semester/ Uang kuliah				
	898.8	Uang saku				
	899	Sarana	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	899.1	Bantuan sarana belajar				
	899.2	Bantuan alat-alat tulis				
	899.3	Bantuan sarana belajar lainnya				

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN